



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029**





PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 44. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, sistematika dan substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1064

KATA PENGANTAR

Dokumen Renstra ini merupakan instrumen perencanaan penting yang berfungsi sebagai **pedoman operasional** dan **acuan kerja** bagi seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, mulai dari tahun 2025 hingga 2029.

Renstra ini disusun sebagai **penjabaran teknis dan strategis** dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan. Hal ini menegaskan komitmen kami untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan benar-benar **selaras, sinergis, dan mendukung** pencapaian Visi dan Misi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya dalam mewujudkan infrastruktur dan tata ruang yang maju, merata, dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada **komitmen, integritas, dan kerja keras** seluruh unsur pimpinan dan staf Dinas, serta dukungan dan kolaborasi aktif dari seluruh *stakeholder*, baik di tingkat pemerintah daerah, pusat, maupun masyarakat.

Oleh karena itu, kami mengharapkan dokumen ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja Dinas, sehingga kontribusi sektor Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau dapat terwujud secara optimal.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah pembangunan daerah.

Tanjungpinang, 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Rodi Yantari, S.T, M.M, M.T.
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP 19770111 200604 1 015



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.3.1 Maksud.....	8
1.3.2 Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah	11
2.1.2 Sumber daya perangkat daerah.....	23
2.1.3 Kinerja pelayanan perangkat daerah.....	31
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	53
2.1.5 Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan	54
2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah.....	55
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	56
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	56
2.2.2 Isu strategis	57
 BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	61
3.2 Strategi.....	69
3.3 Arah Kebijakan.....	71



**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan	74
4.2 Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas	165
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.	168
4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	168

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Pening Substansial	170
5.2. Kaidah Pelaksanaan	170
5.3 Pedoman Pengendalian dan Evaluasi	171



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	23
Tabel 2.2.	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025.....	25
Tabel 2.3.	Jumlah dan Kondisi Aset Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	27
Tabel 2.4.	Luas Kawasan Rawan Gelombang Ekstrem Dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau.....	32
Tabel 2.5.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024.....	36
Tabel 2.6.	Kelembagaan Penyelenggara SPAM milik pemerintah daerah	37
Tabel 2.7.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	39
Tabel 2.8.	Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau	40
Tabel 2.9.	Jumlah Titik Rawan Banjir Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau	40
Tabel 2.10.	Capaian Indikator Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2020-2024.....	51
Tabel 2.11.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	57
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	68
Tabel 3.2.	Strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.....	70
Tabel 3.3.	Tahapan Rencana Strategis.....	71
Tabel 3.4.	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	72
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra	



	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan.....	81
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.....	117
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	165
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	168
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	168



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	2
Gambar 1.2	Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	22
Gambar 2.2	SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	23
Gambar 2.3	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	31
Gambar 2.4	Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi.....	33
Gambar 2.5	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota Tahun 2020-2024	34
Gambar 2.6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	36
Gambar 2.7	Rasio Kemantapan Jalan.....	46
Gambar 2.8	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

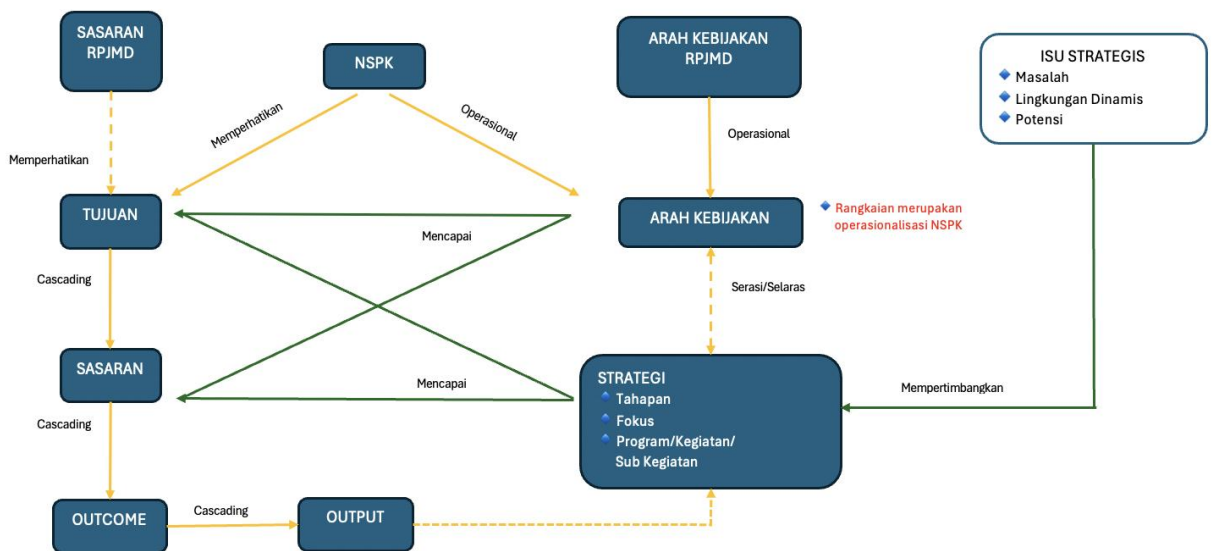
Pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan memerlukan perencanaan yang sistematis, partisipatif, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan berperan penting dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan agar dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat secara efektif. Oleh karena itu, dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Strategis (Renstra) menjadi instrumen penting dalam menjamin keterpaduan antara visi misi daerah dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan merupakan amanat konstitusional yang diatur dalam berbagai regulasi. Salah satu dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi selama lima tahun. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah dalam kerangka pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memberikan landasan hukum yang lebih spesifik terkait penyusunan Renstra oleh perangkat daerah. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa perangkat daerah harus menyusun dokumen perencanaan strategis yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, penyusunan Renstra juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan agar proses perencanaan menjadi lebih akurat, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sementara itu pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Kepala



Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Rencana Strategis PD disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut.



Gambar 1.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah menekankan pentingnya penyusunan Renstra yang berbasis pada pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up. Instruksi ini juga memberikan pedoman teknis dan metodologi dalam penyusunan Renstra, termasuk integrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), agar terjadi keselarasan dan konsistensi antar dokumen perencanaan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau memuat rumusan arah kebijakan strategis yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas selama lima tahun ke depan. Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Renstra ini juga berfungsi untuk mengarahkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program kerja agar lebih efektif, efisien, dan terukur. Sedangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra sesuai dengan Inmendagri 2 tahun 2025 disusun melalui beberapa tahapan, yaitu:



Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu perangkat daerah strategis memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penataan ruang yang berkelanjutan, serta pengelolaan pertanahan yang tertib dan adil. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 menjadi bagian integral dari upaya perwujudan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.



Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan memiliki karakteristik geografis yang unik serta tantangan pembangunan tersendiri, terutama dalam hal konektivitas antarwilayah, pengelolaan ruang darat dan laut, serta ketersediaan infrastruktur dasar. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu merumuskan kebijakan dan program yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan daerah, sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat mengintegrasikan kebijakan sektoral dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Dengan adanya dokumen Renstra ini, maka seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan Dinas PUPRP dapat dijalankan secara sistematis, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Dengan demikian, Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas selama lima tahun ke depan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, serta berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan



- Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang



- Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);



27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
29. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

- a. Sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 5 tahun

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.



- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya.
- c. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Dasar Hukum penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berisi Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok sasaran, mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah), Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau melalui Indikator IKU dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP



Berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan



- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:

- a. Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Bidang Sumber Daya Air
 - 1. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- c. Bidang Bina Marga;
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- d. Bidang Cipta Karya;
 - 1. Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi;
 - 2. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis;
- e. Bidang Bina Konstruksi;
 - 1. Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi;
 - 2. Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas yang melaksanakan fungsi pendukung memiliki tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan kantor. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
- b. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
- c. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;



- d. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- e. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- f. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
- b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- d. penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian
- e. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- f. pelaksanaan urusan pengaturan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan sekitar gedung;
- g. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- h. penyusunan *job description* seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan teknik dan evaluasi, pelaksanaan sumber daya air, dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:



- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait perencanaan teknik dan evaluasi, pelaksanaan sumber daya air, dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program/kegiatan pengelolaan sumber daya air untuk jangka pendek maupun jangka panjang yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
- c. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan data pengelolaan sumber daya air;
- d. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
- g. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- h. pelaksanaan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Sumber Daya Air terdiri atas: Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, melaksanakan kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak, pengendalian dan pengawasan teknis dalam rangka pelaksanaan sumber daya air. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan teknis, pengendalian dan pengawasan teknis untuk pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dinas yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
- c. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK) pada pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air, yang meliputi pelaksanaan konservasi,



pemberdayaan dan pengendalian daya rusak air yang menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
- b. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu pengelolaan operasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka kegiatan monitoring, pengendalian dan pengawasan pengelolaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air yang menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi;
- d. pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan atas penggunaan dan pengusahaan air tanah yang menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi;
- e. pelaksanaan persiapan dan perencanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- f. pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK);
- g. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- h. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan teknik dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:



- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait perencanaan teknis dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan, dan preservasi jalan dan jembatan;
- b. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan sinkronisasi program-program kebinamargaan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
- d. pelaksanaan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;
- e. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu konstruksi jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
- g. pelaksanaan database kondisi jalan dan jembatan, evaluasi dan penetapan leger (jalan sertifikasi Tanah Jalan Provinsi);
- h. pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa bidang Bina Marga;
- j. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Bidang Bina Marga;
- k. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Bidang Bina Marga;
- l. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
- m. penyusunan bahan dan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembangunan jalan dan jembatan;
- n. penyusunan bahan dan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait preservasi jalan dan jembatan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Bina Marga terdiri atas: Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan. Untuk



melaksanakan tugas, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
- c. pelaksanaan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- h. pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK); dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
- d. pelaksanaan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- f. memfasilitasi pengadaan barang dan jasa Preservasi Jalan dan Jembatan;
- g. pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK);
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan teknik dan evaluasi, pengembangan spam dan sanitasi dan,



penataan bangunan dan pengembangan kawasan strategis. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait perencanaan teknik dan evaluasi, pengembangan spam dan sanitasi, penataan bangunan dan pengembangan kawasan strategis;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan pembiayaan jangka panjang/menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
- c. pelaksanaan sinkronisasi program-program keciptakaryaan;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan data bidang Cipta Karya;
- e. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu bidang cipta karya;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa bidang cipta karya;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah di Bidang Cipta Karya;
- h. pelaksanaan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja bidang cipta karya
- i. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Cipta Karya terdiri atas: Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi; dan Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis.

Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan SPAM dan sanitasi. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM Lintas Daerah/Kawasan pada Kabupaten Kota;
- b. pelaksanaan pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional/Kawasan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional/Kawasan;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai Lintas Daerah/kawasan pada Kabupaten/Kota;



- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa Pengembangan SPAM dan sanitasi;
- g. pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK); dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan bangunan dan pengembangan kawasan strategis. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan strategis Provinsi;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan serta Bangunan Gedung pada kawasan strategis Provinsi;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan;
- e. pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK);
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait bina kelembagaan dan informasi jasa konstruksi, bina kompetensi tenaga ahli konstruksi, bina penyelenggaraan jasa konstruksi. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait bina kelembagaan dan informasi jasa konstruksi, bina kompetensi tenaga ahli konstruksi, bina penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi;
- c. pelaksanaan pengelolaan operasional layanan informasi Jasa konstruksi;
- d. pelaksanaan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi;
- e. pelaksanaan peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI;



- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Konstruksi terdiri atas: Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi; dan Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga ahli konstruksi;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan tenaga ahli konstruksi;
- c. pelaksanaan Identifikasi potensi kerja sama peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada Kawasan Strategis Provinsi;
- b. pelaksanaan penyiapan rumusan/rancangan kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan jasa konstruksi;
- d. pelaksanaan pembinaan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.
- e. pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK);
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang, Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang, dan Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan



- Ruang; Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang, dan Pertanahan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
 - h. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pendidikan, pelatihan, penelitian, kajian dan pengembangan bidang penataan ruang;
 - i. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kelembagaan penataan ruang
 - j. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - k. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
 - l. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - m. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi Pemberian Insentif dan Disentif, peneraan sanksi dan penyelesaian sengketa penataan ruang
 - n. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - o. penyiapan bahan fasilitasi pemberian izin lokasi lintas daerah (perbatasan) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - p. penyiapan bahan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pendelegasian penetapan lokasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota;

- q. penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah (perbatasan) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- r. penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan pendelegasian penetapan lokasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
- s. penyiapan bahan fasilitasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas daerah (Perbatasan) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- t. penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah (Perbatasan) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- u. penyiapan bahan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah (Perbatasan) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

2.1.2 Sumber daya perangkat daerah

a. Sumber Daya Manusia

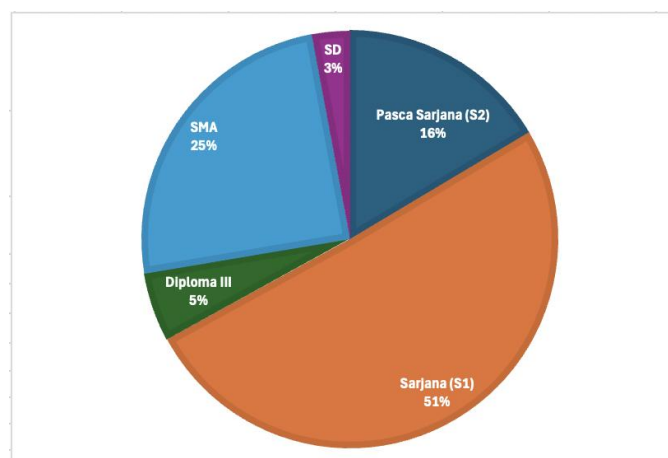
Jumlah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 198 orang yang terdiri dari 170 orang ASN dan 28 orang Pegawai Non ASN. Jumlah ASN di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau terbagi atas 121 orang laki-laki dan 49 orang Perempuan. Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya sebanyak 28 orang berpendidikan Paska Sarjana, sebanyak 86 orang berpendidikan Sarjana, sebanyak 9 orang berpendidikan Diploma III, sebanyak 42 orang berpendidikan Sekolah Menengah Atas dan sebanyak 5 orang berpendidikan Sekolah Dasar.

Secara lengkap SDM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (S2)	28
2	Sarjana (S1)	86
3	Diploma III	9
4	SMA	42
5	SD	5
Jumlah		170

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

Gambar 2.2 SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan data tahun 2025, kondisi sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan komposisi yang cukup beragam dari segi pangkat dan golongan. Secara keseluruhan, terdapat kecenderungan dominasi pegawai pada jenjang golongan III, khususnya pada pangkat *Penata Tingkat I (III.d)* yang mencapai 33 orang, *Penata (III.c)* sebanyak 10 orang, serta *Penata Muda Tk. I (III.b)* sebanyak 9 orang. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada level menengah karier yang relatif produktif dan memiliki pengalaman kerja cukup matang.

Sementara itu, jumlah pegawai pada golongan IV relatif lebih sedikit namun tetap signifikan. Misalnya, terdapat 10 orang pada jenjang *Pembina (IV.a)*, 5 orang pada *Pembina Tk. I (IV.b)*, serta 1 orang pada *Pembina Utama Muda (IV.c)*. Keberadaan pegawai di golongan IV ini mencerminkan adanya struktur kepemimpinan dan pembinaan yang dapat menjadi motor penggerak organisasi. Namun, jumlahnya yang terbatas juga menunjukkan perlunya regenerasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan ke depan. Pada level yang lebih rendah, hanya terdapat 1 orang dengan golongan II.c (Pengatur), yang menunjukkan bahwa rekrutmen tenaga baru di level golongan bawah sangat minim. Kondisi ini dapat menjadi tantangan dalam jangka panjang karena regenerasi dari bawah tidak seimbang dengan jumlah pegawai pada level menengah.

Dalam struktur kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau keberadaan pegawai dengan status PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) cukup signifikan, yakni 49 orang di GOL IX dan 3 orang di GOL VII. Jumlah ini menunjukkan bahwa PPPK kini telah menjadi bagian penting dalam mendukung operasional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, terutama dalam mengisi kebutuhan teknis yang tidak dapat sepenuhnya ditopang oleh ASN reguler.

Secara umum, profil SDM di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 mencerminkan dominasi pegawai pada golongan menengah dengan dukungan signifikan dari PPPK. Struktur ini cukup ideal untuk menopang produktivitas jangka pendek hingga menengah.

Jumlah SDM berdasarkan jabatan struktural sesuai dengan Pergub SOTK bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2.2.
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025

No	Pangkat & Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Tk. I (IV/B)	5
2	Pembina Utama Muda (IV/C)	1
3	Pembina (IV.a)	10
4	Penata Tk. I (III.d)	33
5	Penata (III.c)	10
6	Penata Muda Tk. I (III.b)	9
7	Penata Muda (III.a)	5
8	Pengatur (II.c)	1
9	PPPK GOL IX	49
10	PPPK GOL VII	3

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

b. Aset

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dasar serta penataan ruang wilayah yang mendukung pertumbuhan wilayah dan konektivitas antar pulau. Dalam pelaksanaan tugasnya, dinas ini didukung oleh berbagai aset, baik berupa aset tanah, gedung kantor, peralatan teknis, dan peralatan pendukung pelayanan tugas dan fungsi lainnya. Namun demikian, kondisi aset yang dimiliki masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan jumlah dan kualitas alat berat untuk mendukung pekerjaan lapangan, serta kondisi sarana dan pendukung lainnya. Selain itu, penyebaran aset yang tersebar di wilayah kepulauan menyebabkan tingginya biaya pemeliharaan dan kebutuhan sistem manajemen aset yang lebih terintegrasi.

Berdasarkan data rekapitulasi kondisi aset pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, terlihat bahwa total aset cukup beragam, mencakup peralatan kantor, laboratorium, kendaraan, hingga peralatan teknis konstruksi dan pemetaan.

Secara umum, jumlah aset dalam kondisi baik mendominasi, yaitu pada AC Split (28 unit), Laptop (83 unit), PC Unit (44 unit), Printer (120 unit), serta Sepatu Tahan Tekanan (77 unit). Hal ini menunjukkan adanya aset yang masih layak pakai dan dapat mendukung operasional dinas secara optimal. Namun, terdapat pula aset



dengan tingkat kerusakan berat yang cukup signifikan, antara lain Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi memiliki 92 unit rusak berat dari total 99 unit, Alat Peraga Praktek Sekolah bidang Matematika tercatat seluruhnya 176 unit dalam kondisi rusak berat, serta Printer terdapat 81 unit rusak berat dari total 202 unit. Kondisi ini menunjukkan adanya peralatan yang sudah tidak dapat digunakan lagi dan membutuhkan perhatian untuk peremajaan atau penggantian. Untuk kategori rusak ringan, jumlahnya relatif kecil, misalnya pada Filing Cabinet Besi (1 unit rusak ringan), Kursi Besi/Metal (2 unit), Kursi Pegawai Non Struktural (6 unit), serta beberapa unit komputer dan printer. Aset dengan kerusakan ringan ini masih dapat difungsikan dengan perbaikan sederhana sehingga tidak terlalu membebani anggaran perawatan. Sementara itu untuk aset kendaraan dinas, sebagian besar masih dalam kondisi baik, seperti Mini Bus (3 unit baik), Pick Up (4 unit baik), dan Sepeda Motor (4 unit baik, 1 rusak ringan).

Secara keseluruhan, kondisi aset Dinas PUPR dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau menggambarkan pola bahwa aset bergerak (kendaraan dan perlengkapan kantor) relatif terawat dengan baik, sementara aset laboratorium dan peralatan peraga pendidikan banyak yang sudah dalam kondisi rusak berat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola aset, optimalisasi pemanfaatan, serta peningkatan kapasitas pemeliharaan menjadi agenda penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.



Tabel 2.3.
Jumlah dan Kondisi Aset Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan
Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Nama Barang	Kondisi			Total
	Baik	Rusak Ringan	Rusak berat	
A.C. Split	28	0	0	28
A.C. Window	4	0	8	12
Alat angkutan darat bermotor lainnya	1	0	0	1
Alat bantu lainnya	1	0	0	1
Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	0	0	1	1
Alat Kantor Lainnya	3	0	7	10
Alat Kedokteran Bedah	0	0	1	1
Alat Kedokteran Umum Lainnya	0	0	5	5
Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia	1	0	5	6
Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	6	1	92	99
Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	0	0	5	5
Alat Laboratorium Model Hidrolika	1	0	0	1
Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	0	0	1	1
Alat Pemeriksa Beton	2	0	0	2
Alat Pendingin lainnya	0	0	5	5
Alat Penghancur Kertas	6	0	6	12
Alat Pengolahan lainnya	0	0	2	2
Alat Penyimpanan Hasil Pertanian lainnya	0	0	3	3
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA Lanjutan	0	0	10	10
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Keterampilan	0	0	6	6
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Matematika	0	0	176	176
Alat Rumah Tangga Lain-lain	0	0	24	24
Alat Studio Lainnya	1	0	0	1
Alat Studio Pemetaan Lainnya	1	0	0	1
Alat Timbangan/Biara Lainnya (dst)	0	0	1	1
Alat Ukur Lain-lain (dst)	0	0	1	1
Amplifier	1	0	0	1
Audio Master Control Unit	0	0	1	1
Bak Air	1	0	0	1
Balance Kodek/Kilogram	2	0	0	2
Battery Charger (Peralatan Studio)	0	0	1	1
Bemo	2	0	0	2
Blank Panel	0	0	1	1
Boring & Milling Machine	1	0	0	1
Brandkas	1	0	0	1
Buffet Kaca	1	0	1	2
Cable Drum	0	0	2	2
Camera Conference	2	0	0	2
Camera Electronic	1	0	2	3
Camera Video	2	0	3	5
Cbr Lab. Set Cl.284	1	0	0	1
CCTV - Camera Control Television System	1	0	15	16
Chairman/Audio Conference	0	0	1	1



Nama Barang	Kondisi			Total
	Baik	Rusak Ringan	Rusak berat	
Cold Chamber/Cabinet	0	0	2	2
Compressor	0	0	1	1
Concrete Mixer	1	0	0	1
Concrette Hammer Set	0	0	3	3
Cutting Machine	0	0	1	1
Destilasi Aspal	1	0	0	1
Diamond Saw	0	0	1	1
Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	3	0	0	3
Dispenser	0	0	1	1
Distiling Apparatus	0	0	8	8
Drilling Machine	1	0	0	1
Dump Truck	1	0	1	2
Excavator Lainnya (dst)	1	0	0	1
Filing Cabinet Besi	26	1	2	29
Filling Divice	0	0	10	10
Finger Muscle Therapy	0	0	4	4
Garpu Besi	0	0	6	6
Gergaji	1	0	0	1
Global Positioning System	3	0	6	9
Gordyin/Kray	3	0	0	3
Handy Cam	2	0	1	3
Hard Disk	0	0	1	1
Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	0	0	1	1
HUM/Cable Compensator	0	0	2	2
Karpet	2	0	0	2
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (dst)	1	0	0	1
Kendaraan Bermotor Beroda Dua (dst)	3	0	0	3
Kendaraan Bermotor Khusus (dst)	2	0	0	2
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (dst)	1	0	0	1
Kursi Besi/Metal	8	2	0	10
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	0	0	1
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	24	6	1	31
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	0	3	5
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	0	0	3
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	0	0	15
Kursi Kerja Pejabat lainnya	6	0	12	18
Kursi Rapat	18	0	6	24
Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	23	0	0	23
Kursi Tamu	1	0	0	1
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	4	0	0	4
Lap Top	83	0	21	104
Layar Film/Projector	2	0	2	4
LCD Projector/Infocus	1	0	0	1
Lemari Besi/Metal	4	0	0	4
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	8	1	0	9
Lemari Es	2	0	0	2
Lemari Kayu	1	0	0	1
Lis Sepatu	0	0	7	7



Nama Barang	Kondisi			Total
	Baik	Rusak Ringan	Rusak berat	
Meja Kerja Kayu	19	0	0	19
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	27	0	0	27
Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	0	0	2
Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	0	0	3
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	0	0	12
Meja Kerja Pejabat lain-lain	2	0	0	2
Meja Rapat	2	0	0	2
Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	0	0	1
Meja Resepsionis	0	0	0	0
Meja Tamu Biasa	1	0	0	1
Mesin Absen (Time Recorder)	0	0	0	0
Mesin Absensi	3	0	0	3
Mesin Ketik Elektronik/Selektik	3	0	0	3
Mesin Ketik Listrik	0	0	1	1
Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	0	0	2	2
Mesin Pemotong Rumput	4	0	17	21
Mesin Pompa Air PMK	2	0	0	2
Meubeleur lainnya	6	1	0	7
Microphone	1	0	0	1
Microphone Table Stand	0	0	10	10
Mikroskop Dengan Camera	1	0	0	1
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	0	0	3
Mobil Tangki Air	0	0	1	1
Modified Mold	0	0	10	10
Note Book	1	0	53	54
P.C Unit	44	1	14	59
Partisi	2	0	0	2
Mobil Tangki Air	0	0	1	1
Modified Mold	0	0	10	10
Note Book	1	0	53	54
P.C Unit	44	1	14	59
Partisi	2	0	0	2
Penetrasi Asphalt (Universal Penetrometer)	1	0	0	1
Peralatan Jaringan lainnya	0	0	6	6
Peralatan Komputer lainnya	2	0	0	2
Peralatan Mainframe lainnya	0	0	10	10
Peralatan Personal Komputer lainnya	15	0	18	33
Peralatan Studio Audio lainnya	0	0	2	2
Peralatan Tukang Besi lainnya	0	0	1	1
Perkakas Bengkel Konstruksi Logam lainnya	0	0	1	1
Personal Komputer lainnya	0	0	1	1
Pick Up	4	0	0	4
Picnometer	0	0	1	1
Pompa Air	0	0	4	4
Printer (Peralatan Personal Komputer)	120	1	81	202
Pukul Sabit	0	0	7	7
Rak Besi	15	0	0	15
Rak Kayu	1	0	0	1



Nama Barang	Kondisi			Total
	Baik	Rusak Ringan	Rusak berat	
Rambu Jalan	1	0	0	1
Rambu Jembatan	0	0	0	0
Rambu Papan Tambahan	1	0	0	1
Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	19	0	0	19
Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	1	0	0	1
Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	0	3	4
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	0	1	5
Scanner (Universal Tester)	0	0	4	4
Sepatu Tahan Tekanan	77	0	0	77
Sepeda Motor	4	1	0	5
Sieve	0	0	6	6
Slide Projector	0	0	1	1
Sofa	5	0	0	5
Sound Syste	1	0	0	1
Speaker Komputer	1	0	0	1
Stability Mold	0	0	10	10
Station Wagon	2	0	1	3
Step Up/Down (Alat Rumah Tangga Lainnya - Home Use)	2	0	0	2
Tablet PC	3	0	0	3
Televisi	5	0	6	11
Theodolite (Peralatan Hidrologi)	0	0	1	1
Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/Ukur Tanah)	0	0	1	1
Tractor lainnya	0	0	2	2
Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	2	0	0	2
Truck + Attachment	0	0	2	2
Tungku	0	0	1	1
Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	0	0	1
Unit alat laboratorium lainnya	0	0	1	1
Vertical Abrasive	0	0	1	1
Vertical Bandsaw	0	0	1	1
Video Printer	0	0	2	2
Video Tape Recorder Stationer	1	0	0	1
Viscosimeter (Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia)	1	0	0	1
Volume Metric Flash	0	0	6	6
Wash Bottle Purex	0	0	2	2

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

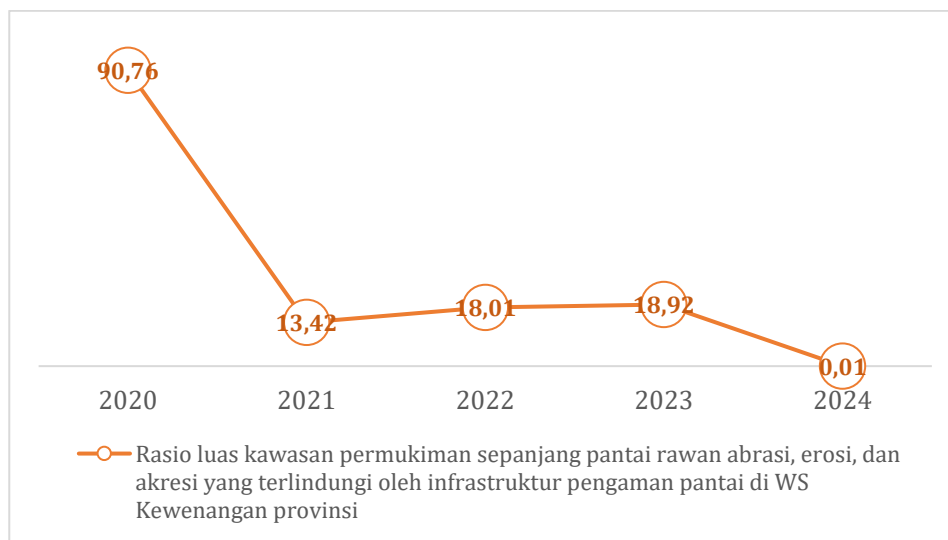
Terkait pengamanan asset, terdapat beberapa asset yang belum dipasang Papan nama asset, seperti waduk sei jago di Kabupaten Bintan dan waduk selat lampa di kabupaten Natuna, sehingga kedepan perlu diupayakan pengamanan asset dengan pemasangan papan nama.

2.1.3 Kinerja pelayanan perangkat daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kondisi yang cukup baik.

a. Sumber Daya Air (SDA)

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman Pantai di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021, capaian sangat tinggi sebesar 90,76 persen, namun kemudian menurun menjadi 13,42 persen di tahun 2022. Pada tahun 2023 sedikit menunjukkan peningkatan namun tetapi kembali menurun hingga 0,01 persen pada 2024. Fenomena penurunan drastis perlindungan kawasan pesisir ini sangat mengkhawatirkan karena kawasan permukiman sepanjang pantai rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut, abrasi, dan banjir rob. Ketidakmampuan mempertahankan infrastruktur pengaman pantai dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan risiko sosial bagi masyarakat pesisir.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

Gambar 2.3 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi



Kawasan rawan abrasi meliputi kawasan yang mengalami perubahan bentuk pantai yang diakibatkan oleh gelombang laut, arus laut dan pasang surut laut terutama yang berada di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar. Pantai-pantai yang rawan terhadap abrasi antara lain:

- a. Pulau Karimun: Pantai Tanjung Balai sepanjang ± 4 km, Pantai Pelawan sepanjang ± 3 km, Pantai Pongkar sepanjang ± 6 km, Pantai Tanjung Sebatak sepanjang ± 4 km dan Pantai Sepedas sepanjang ± 4 km.
- b. Pulau Kundur: Pantai Timur sepanjang ± 5 km, Pantai Selat Beliah sepanjang ± 7 km, Pantai Urung sepanjang ± 3 km dan Pantai Parit Jepang sepanjang ± 3 km.
- c. Pulau Bintan: Pantai Trikora sepanjang ± 10 km, Pantai Tanjung Uban sepanjang ± 5 km, Pantai Sei Kecil - Sakera sepanjang ± 10 km, Pantai Lobam sepanjang ± 4 km, Pantai Senggarang sepanjang ± 4 km, Pantai Penyengat sepanjang ± 8 km, Pantai Barat Tanjungpinang sepanjang ± 8 km, Pantai Pulau Dompak, Pantai Dompok Seberang sampai Tanjung Mochi serta pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang dan Tambelan.
- d. Pulau Singkep: Pantai Kota Dabo sepanjang ± 4 km, Pantai Kote sepanjang ± 3 km, Pantai Jagoh sepanjang ± 2 km dan Pantai Kebun Nyiur sepanjang ± 4 km.
- e. Pulau Batam: Pantai Jodoh sepanjang ± 3 Km, Pantai Punggur sepanjang ± 500 m, Pantai Nongsah sepanjang ± 5 Km dan Pantai Melayu sepanjang ± 10 km.
- f. Pulau Ranai: Pantai Kota Ranai sepanjang ± 8 km, Pantai Tanjung sepanjang ± 4 km.

Luas kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 108.958 hektar yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan bahaya kategori Rendah dan Tinggi, dengan rincian sebagai berikut :

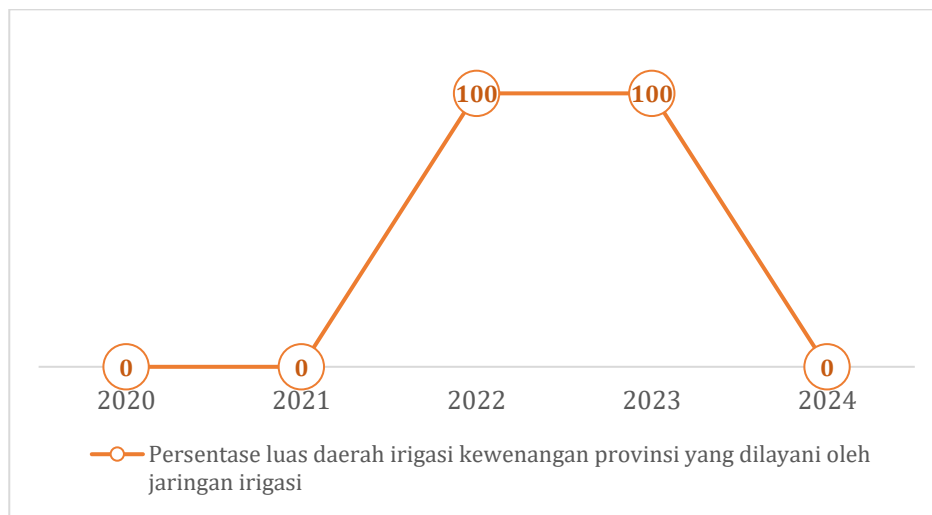
Tabel 2.4.
Luas Kawasan Rawan Gelombang Ekstrim Dan Abrasi
di Provinsi Kepulauan Riau

Kab/Kota	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Kota Tanjungpinang	1.515	Rendah
Kabupaten Bintan	13.837	Tinggi
Kota Batam	18.947	Tinggi
Kabupaten Karimun	14.495	Tinggi
Kabupaten Lingga	30.497	Tinggi

Kab/Kota	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Kabupaten Natuna	12.776	Tinggi
Kabupaten Kepulauan Anambas	16.891	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau	108.958	Tinggi

Sumber : Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

Sementara itu, pada indikator persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi di Provinsi Kepulauan Riau juga menunjukkan perubahan ekstrem. Pada tahun 2021 dan 2022, tidak ada wilayah irigasi yang terlayani. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 100 persen, yang menunjukkan adanya pembangunan atau peralihan kewenangan yang berhasil mengefektifkan pemanfaatan jaringan irigasi.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

Gambar 2.4 Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi

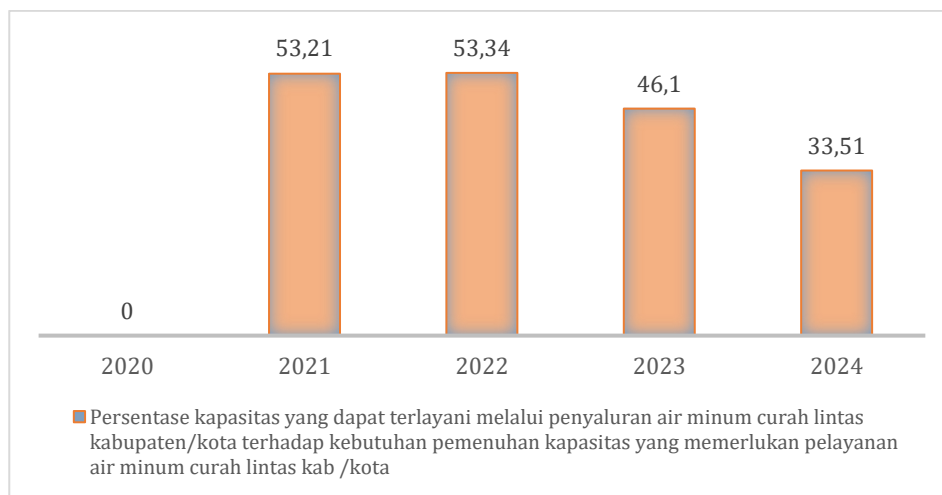
b. Air Minum

Kinerja pelayanan curah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, tidak terdapat layanan sama sekali. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing mencapai 53,21 persen dan 53,34 persen, menunjukkan keberhasilan awal pembangunan infrastruktur dan kebijakan pelayanan lintas wilayah. Meskipun demikian capaian tersebut tidak mampu dipertahankan. Pada tahun 2024, indikator ini mengalami

penurunan menjadi 46,1 persen, dan semakin merosot pada 2024 menjadi 33,51 persen.

Secara keseluruhan, kinerja indikator ini mencerminkan bahwa pelayanan air minum lintas Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau belum sepenuhnya stabil dan terkelola secara optimal. Meski terdapat peningkatan capaian pada pertengahan periode, namun tidak adanya peningkatan yang konsisten dan penurunan drastis pada akhir periode menunjukkan bahwa upaya peningkatan layanan belum optimal.

Kinerja ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan, mengingat air minum merupakan kebutuhan dasar dan Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik geografis kepulauan. Perkembangan capaian kinerja pelayanan air minum curah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

Gambar 2.5 Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota Tahun 2020-2024

Jika dilihat perkembangan data Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan secara konsisten dari tahun 2020 hingga proyeksi tahun 2024. Pada tingkat provinsi, persentase akses layak naik dari 90,41 persen pada tahun 2020



menjadi 91,92 persen di tahun 2023, dan mencapai 92,10 persen pada 2024. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan kualitas infrastruktur dan distribusi Air Minum di wilayah tersebut.

Jika dilihat per kabupaten/kota, terdapat variasi yang cukup mencolok. Kota Batam dan Kota Tanjungpinang konsisten berada pada posisi tertinggi. Batam sempat mencapai 97,62 persen di tahun 2020, meski kemudian sedikit menurun menjadi 93,19 persen di tahun 2023). Sementara itu, Tanjungpinang memperlihatkan peningkatan yang signifikan dari 87,98 persen di tahun 2020 menjadi 97,79 persen di tahun 2023, menjadikannya daerah dengan capaian tertinggi di provinsi.

Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Anambas menempati posisi terendah. Pada tahun 2020 hanya 21,38 persen, bahkan turun di 2021 menjadi 20,51 persen, namun meningkat pesat hingga 80,65 persen pada 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya intervensi kebijakan atau pembangunan infrastruktur yang cukup masif.

Kabupaten lain seperti Karimun, Bintan, Natuna, dan Lingga menunjukkan tren meningkat meskipun fluktuatif. Kabupaten Karimun sempat turun dari 88,62 persen tahun 2020 ke 85,19 persen tahun 2022 sebelum naik lagi menjadi 89,90 persen tahun 2023. Kabupaten Bintan juga menunjukkan perkembangan baik dari 70,16 persen tahun 2020 ke 87,48 persen tahun 2023. Kabupaten Natuna stabil tinggi di atas 80 persen, dan Kabupaten Lingga memperlihatkan peningkatan signifikan dari 58,82 persen tahun 2020 ke 84,24 persen tahun 2023.

Secara keseluruhan, capaian Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang sangat positif. Namun, masih ada kesenjangan antar wilayah, terutama antara wilayah perkotaan dan kepulauan. Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :



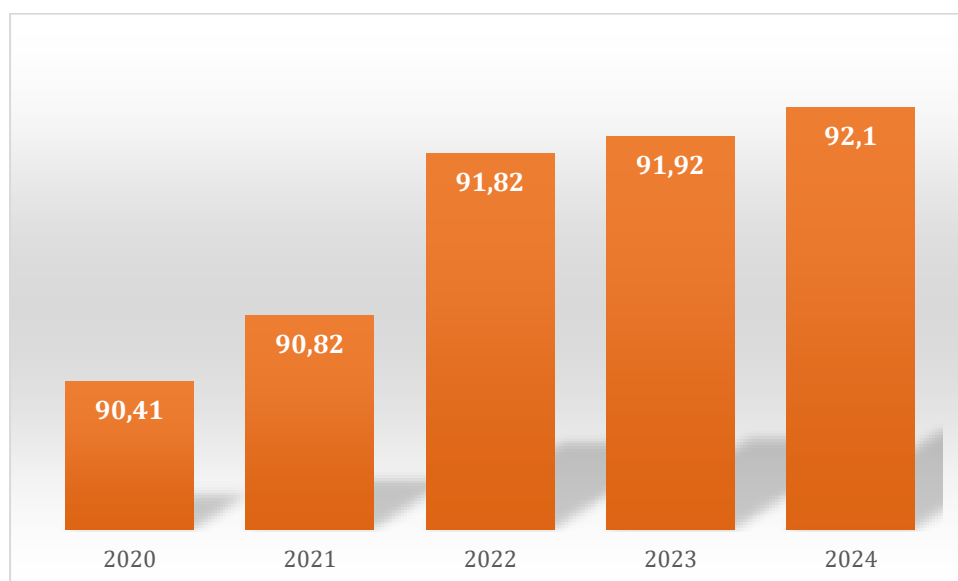
Tabel 2.5.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024*)
Karimun	88,62	88,10	85,19	89,90	
Bintan	70,16	76,64	85,48	87,48	
Natuna	82,72	81,26	87,23	87,44	
Lingga	58,82	81,25	83,48	84,24	
Kepulauan Anambas	21,38	20,51	28,56	80,65	
Batam	97,62	95,63	95,34	93,19	
Tanjungpinang	87,98	91,66	93,35	97,79	
Provinsi Kepulauan Riau	90,41	90,82	91,82	91,92	92,10

Sumber :

BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025 dalam Lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025- 2030)

*) RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



Sumber :

BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025 dalam Lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025- 2030)

*) RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Gambar 2.6 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak



Kelembagaan Penyelenggara SPAM milik pemerintah daerah yang merupakan pelaksana tugas pelayanan SPAM di Kota/kabupaten dan Lintas Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Kelembagaan Penyelenggara SPAM milik pemerintah daerah

No	Kabupaten/Kota	Nama Penyelenggara SPAM	Dasar Pembentukan
1	Kota Batam	UPT BLUD Pengelola Air Minum Kota Batam	Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Minum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
		BU SPAM BP Batam	Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum
2	Kota Tanjungpinang	UPTD BLUD SPAM	Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Kabupaten Bintan	UPTD Air Minum	Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
4	Kabupaten Karimun	Perumda Tirta Mulia Karimun	Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun
5	Kabupaten Lingga	Perumda Tirta Lingga	Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lingga
6	Kabupaten Kep. Anambas	UPTD SPAM	Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas
7	Kabupaten Natuna	Perumda Tirta Nusa	Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Air Minum Tirta Nusa
8	Provinsi Kepulauan Riau	Perumda Air Minum Tirta Kepri	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta



			Kepri
--	--	--	-------

Sumber :

Lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025- 2030)

c. Air Limbah

Capaian indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Selama periode 2020 hingga 2024, menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum tetap berada pada tingkat yang tinggi. Nilai rata-rata provinsi tercatat sebesar 89,19 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 91,62 persen pada 2021, namun menurun cukup tajam menjadi 87,74 persen di tahun 2022. Tren positif kembali terlihat pada dua tahun berikutnya dengan capaian 91,10 persen pada tahun 2023 dan sedikit meningkat menjadi 91,23 persen di tahun 2024.

Kota Batam secara konsisten mencatatkan kinerja tertinggi di antara seluruh Kabupaten/Kota, dengan nilai puncak 97,83 persen pada tahun 2021. Meskipun sempat menurun ke angka 89,20 persen di tahun 2022, Kota Batam mampu kembali menunjukkan tren positif dengan capaian 94,10 persen di tahun 2024. Kota Tanjungpinang juga menunjukkan performa yang kuat, dengan nilai capaian yang stabil dan terus meningkat hingga mencapai 91,51 persen pada tahun 2024. Kinerja dua kota ini mencerminkan kuatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah perkotaan.

Sementara itu, Kabupaten Karimun menunjukkan kinerja terbaik, dengan capaian tertinggi 97,01 persen pada tahun 2022, meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 95,91 persen di tahun 2024. Kabupaten Bintan juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun, dari 77,36 persen pada tahun 2020 menjadi 87,93 persen pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan tata kelola dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

Kabupaten Natuna mengalami peningkatan yang konsisten dari 66,15 persen pada tahun 2020 menjadi 78,98 persen pada tahun 2024. Demikian pula Kabupaten Lingga yang sempat menurun ke angka 65,51 persen di tahun 2022, namun berhasil memperbaiki kinerjanya menjadi 70,13 persen pada 2023, meskipun sedikit menurun kembali pada 2024 menjadi 69,58 persen. Kedua daerah ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pembangunan daerah meskipun belum sepenuhnya stabil.



Di sisi lain, Kabupaten Kepulauan Anambas masih menjadi wilayah dengan kinerja terendah di Provinsi Kepulauan Riau. Nilainya sempat meningkat dari 23,95 persen pada tahun 2020 ke 33,80 persen pada tahun 2021, namun mengalami penurunan kembali hingga mencapai 26,55 persen pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi daerah kepulauan terluar, seperti keterbatasan akses, minimnya infrastruktur dasar, serta rendahnya kapasitas kelembagaan.

Secara keseluruhan, meskipun capaian kinerja indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kepulauan Riau relatif tinggi, namun kesenjangan antar wilayah masih menjadi tantangan utama. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020–2024

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	89,56	92,88	97,01	96,85	95,91
Bintan	77,36	79,76	87,64	86,74	87,93
Natuna	66,15	70,71	76,51	76,56	78,98
Lingga	58,51	68,18	65,51	70,13	69,58
Kepulauan Anambas	23,95	33,80	29,07	30,46	26,55
Batam	95,99	97,83	89,20	94,45	94,10
Tanjungpinang	85,59	84,47	91,71	92,69	91,51
Provinsi Kepulauan Riau	89,19	91,62	87,74	91,10	91,23

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

d. Drainase

Capaian kinerja Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Provinsi Kepulauan Riau masih cukup rendah. Kinerja capaian indikator ini hanya sebesar 34,713 (tahun 2022), dan sedikit meningkat menjadi 37,16 (tahun 2023). Rendahnya rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain infrastruktur pengendalian banjir, seperti sistem drainase yang memadai, tanggul, waduk, serta normalisasi sungai, berperan dalam mengurangi risiko genangan air yang dapat merusak permukiman dan mengganggu aktivitas masyarakat. Semakin tinggi rasio



kawasan yang terlindungi, semakin baik pula ketahanan wilayah terhadap bencana banjir, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk serta meminimalkan kerugian ekonomi akibat kerusakan infrastruktur dan properti.

Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan banjir terutama terdapat di kawasan tangkapan air yang daerah resapan airnya sudah mengalami kerusakan lingkungan (berubah fungsi lahan) seperti reklamasi dan wilayah dengan drainase yang kurang berfungsi secara baik, sehingga sungai tidak mampu lagi menampung jumlah aliran permukaan dan air meluap dari badan sungai. Kawasan rawan banjir tersebar di 7 Kabupaten/Kota dengan luasan mencapai 573.425 hektar. Untuk Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kota Batam termasuk kategori tinggi, sedangkan Kabupaten Karimun, Lingga Natuna, dan Kepulauan Anambas termasuk kategori sedang. Potensi luas bahaya banjir terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8.
Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau

Kab/Kota	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Kota Tanjungpinang	11.104	Tinggi
Kabupaten Bintan	106.477	Tinggi
Kota Batam	78.136	Tinggi
Kabupaten Karimun	71.488	Sedang
Kabupaten Lingga	160.476	Sedang
Kabupaten Natuna	134.704	Sedang
Kabupaten Kepulauan Anambas	11.080	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau	573.425	Tinggi

Sumber : Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

Titik rawan banjir di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 453 titik, dengan perincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9.
Jumlah Titik Rawan Banjir Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kota/ Desa	Kecamatan	Titik Banjir
A	Kabupaten Karimun		
1	Baran Barat	Meral	3
2	Darussalam	Meral Barat	0
3	Gemuruh	Kundur Barat	1
4	Meral Kota	Meral	1
5	Ngal	Kundur	0



No	Kota/ Desa	Kecamatan	Titik Banjir
6	Pamak	Tebing	0
7	Sungai Asam	Belat	0
8	Sei Raya	Meral	0
9	Sungai Ungar	Kundur	2
10	Sungai Ungar Utara	Kundur Utara	2
11	Sungai Lakam Timur	Karimun	5
12	Tanjung Balai Kota	Karimun	1
13	Tebing	Tebing	1
14	Teluk Air	Karimun	1
	Total		17
B	KABUPATEN BINTAN		
1	Batu Lepuk	Tambelan	1
2	Ekan Aculai	Telok Sebong	1
3	Gunung Lengkuas	Bintan Timur	3
4	Kampung Hilir	Tambelan	1
5	Kijang Kota	Bintan Timur	18
6	Kota Baru	Telok Sebong	1
7	Kukup	Tambelan	0
8	Lancang Kuning	Tambelan	0
9	Malang Rapat	Gunung Kijang	0
10	Pengudang	Telok Sebong	0
11	Sebong Pereh	Telok Sebong	0
12	Sri Bintan	Telok Sebong	0
13	Sungai Enam	Bintan Timur	1
14	Sungai Lekop	Bintan Timur	1
15	Tanjung Uban Kota	Bintan Utara	2
16	Tanjung Uban Selatan	Bintan Utara	5
17	Tanjung Uban Utara	Bintan Utara	1
18	Teluk Sekuni	Tambelan	0
19	Toapaya	Toapaya	1
20	Toapaya Asri	Toapaya	3
21	Toapaya Selatan	Toapaya	2
22	Toapaya Utara	Toapaya	3
	Total		44
C	Kabupaten Lingga		
1	Batu Kacang	Singkep	1
2	Dabo Lama	Singkep	1
3	Daik	Lingga	3
4	Kerandin	Lingga Timur	2
5	Limbung	Lingga Utara	0
6	Sei Harapan	Singkep Barat	0
7	Sungai Raya	Singkep Barat	1
8	Tanjung Harapan	Singkep	1
	Total		9
D	Kabupaten Natuna		
1	Air Nusa	Serasan Timur	0
2	Air Ringau	Serasan Timur	0
3	Arung Ayam	Serasan Timur	1



No	Kota/ Desa	Kecamatan	Titik Banjir
4	Bandarsyah	Bunguran Timur	3
5	Batu Hitam	Bunguran Timur	6
6	Batubi Jaya	Bunguran Batubi	1
7	Kampung Hilir	Serasan	0
8	Kelanga	Bunguran Timur Laut	1
9	Kelarik Utara	Bunguran Utara	1
10	Payak	Serasan Timur	0
11	Pulau Tiga	Pulau Tiga Barat	1
12	Ranai Darat	Bunguran Timur	2
13	Ranai Kota	Bunguran Timur	5
14	Sebadai Ulu	Bunguran Timur Laut	0
15	Tanjung Kumbik Utara	Pulau Tiga Barat	1
	Total		22
E	Kabupaten Kepulauan Anambas		
	Ulu Maras	Jemaja Timur	3
	Tarempa Selatan	Siantan	3
	Terempa	Siantan	7
	Total		13
F	KOTA TANJUNGPINANG		
1	Air Raja	Tanjung Pinang Timur	5
2	Batu IX	Tanjung Pinang Timur	26
3	Dompak	Bukit Bestari	2
4	Kampung Baru	Tanjung Pinang Barat	5
5	Kampung Bulang	Tanjung Pinang Timur	2
6	Kemboja	Tanjungpinang Barat	0
7	Melayu Kota Piring	Tanjungpinang Timur	0
8	Penyengat	Tanjungpinang Kota	0
9	Pinang Kencana	Tanjung Pinang Timur	11
10	Sei Jang	Bukit Bestari	5
11	Senggarang	Tanjung Pinang Kota	1
12	Tanjung Ayun Sakti	Bukit Bestari	6
13	Tanjung Pinang Barat	Tanjung Pinang Barat	13
14	Tanjung Pinang Kota	Tanjung Pinang Kota	2
15	Tanjung Pinang Timur	Bukit Bestari	5
16	Kampung Bugis	Tanjung Pinang Kota	1
17	Tanjung Unggat	Bukit Bestari	11
	Total		95
G	Kota Batam		
1	Baloi Indah	Lubuk Baja	2
2	Baloi Permai	Batam Kota	5
3	Batu Besar	Nongsa	13
4	Batu Selicin	Lubuk Baja	3
5	Belian	Batam Kota	13
6	Bengkong Indah	Bengkong	3
7	Bengkong Laut	Bengkong	1
8	Bukit Tempayan	Batu Aji	8



No	Kota/ Desa	Kecamatan	Titik Banjir
9	Buliang	Batu Aji	19
10	Duriangkang	Sei Beduk	14
11	Kabil	Nongsa	12
12	Kampung Pelita	Lubuk Baja	0*
13	Kampung Seraya	Batu Ampar	4
14	Kibing	Batu Aji	7
15	Lubuk Baja Kota	Lubuk Baja	13
16	Mangsang	Sei Beduk	3
17	Muka Kuning	Sei Beduk	2
18	Patam Lestari	Sekupang	3
19	Sadai	Bengkong	7
20	Sagulung Kota	Sagulung	11
21	Sambau	Nongsa	3
22	Sukajadi	Batam Kota	6
23	Sungai Binti	Sagulung	7
24	Sungai Harapan	Sekupang	7
25	Sungai Jodoh	Batu Ampar	12
26	Sungai Langkai	Sagulung	10
27	Sungai Lekop	Sagulung	1
28	Sungai Panas	Batam Kota	1
29	Sungai Pelunggut	Sagulung	5
30	Taman Baloi	Batam Kota	6
31	Tanjung Buntung	Bengkong	2
32	Tanjung Piayu	Sei Beduk	4
33	Tanjung Pinggir	Sekupang	1
34	Tanjung Riau	Sekupang	4
35	Tanjung Sengkuang	Batu Ampar	8
36	Tanjung Uma	Lubuk Baja	2
37	Tanjung Uncang	Batu Aji	8
38	Teluk Tering	Batam Kota	5
39	Tembesi	Sagulung	10
40	Tiban Baru	Sekupang	1
41	Tiban Indah	Sekupang	5
42	Tiban Lama	Sekupang	2
	Total		253
	Total Provinsi Kepulauan Riau		453

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau, 2025

e. Bangunan Gedung

Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, capaian berada pada angka 68,75 persen, kemudian mengalami lonjakan tajam menjadi 100 persen pada tahun 2023 dan tetap terjaga di angka maksimal tersebut pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam



mengarahkan dan mengendalikan penataan bangunan gedung yang mendukung kepentingan strategis daerah, seperti fasilitas pelayanan publik, infrastruktur pemerintahan, serta bangunan yang memiliki nilai penting secara sosial, ekonomi, dan keamanan wilayah. Peningkatan ini juga mengindikasikan adanya perbaikan dalam perencanaan, koordinasi lintas sektor, serta penguatan pengawasan dan regulasi bangunan gedung yang sesuai dengan prinsip keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan. Konsistensi capaian 100 persen selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang telah dilakukan cukup efektif, namun tetap perlu dijaga melalui pemutakhiran data, pengendalian perizinan, serta pengawasan teknis agar bangunan gedung strategis di Provinsi Kepulauan Riau dapat terus memenuhi standar tata bangunan dan mendukung prioritas pembangunan daerah.

Sebagai rencana prioritas dari Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau adalah rencana “Penataan Kantor Pemerintahan di Pulau Dompok”. Kegiatan ini juga akan melanjutkan pemeliharaan kawasan perkantoran yang telah dilakukan sejak tahun 2025. Adapun Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau ditujukan untuk mendukung program prioritas dari Kepala Daerah.

f. Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan capaian yang optimal dengan angka 100 persen secara konsisten selama periode 2022 hingga 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memastikan bahwa kawasan-kawasan strategis, baik di tingkat provinsi maupun yang melintasi batas administratif Kabupaten/Kota, telah ditata secara terencana dan sesuai ketentuan.

Konsistensi capaian 100 persen menunjukkan efektivitas koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan ruang lintas wilayah. Hal ini juga mengindikasikan adanya kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan, serta dukungan pengawasan dan pengendalian yang memadai di lapangan. Meskipun capaian telah maksimal,

tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi, terutama terkait dinamika pertumbuhan kawasan, tekanan alih fungsi lahan, serta perlunya menjaga kualitas lingkungan dan estetika kawasan. Oleh karena itu, keberlanjutan penataan memerlukan penguatan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang, pembinaan teknis yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan pembangunan di kawasan strategis secara *real time* dan terintegrasi.

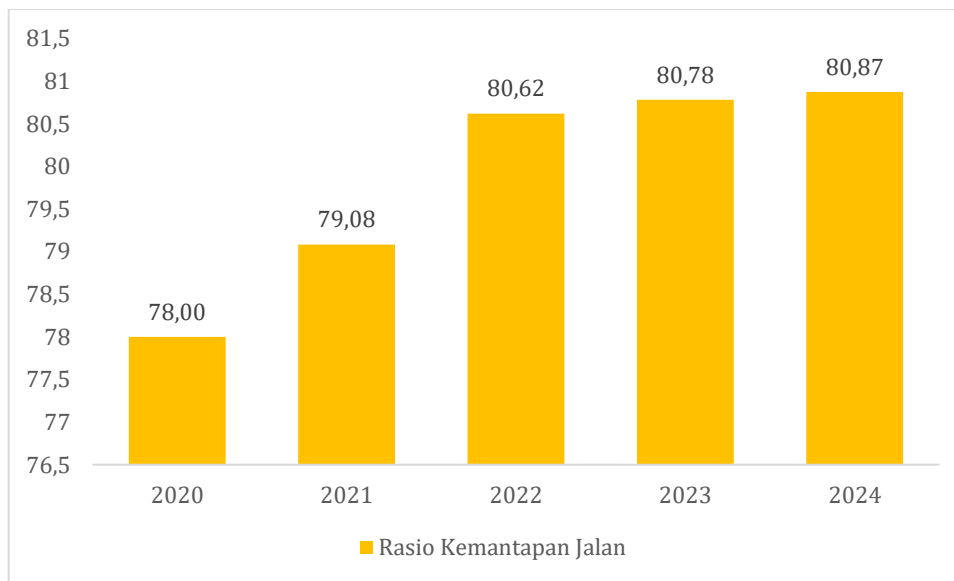
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, terdapat beberapa kegiatan yang akan menjadi prioritas adalah:

1. Penataan Kawasan Cagar Budaya di Pulau Penyengat dan Kabupaten Lingga
2. Penataan Kawasan Kota Lama Kota Tanjungpinang
3. Penataan Kawasan Gurindam 12

g. Jalan

Rasio kemantapan jalan merupakan indikator penting dalam menilai kualitas infrastruktur jalan yang dapat menunjang mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi daerah. Berdasarkan data, capaian rasio kemantapan jalan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, rasio kemantapan jalan tercatat sebesar 78,00 persen, kemudian meningkat menjadi 80,87 persen pada tahun 2024.

Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memperbaiki dan memelihara kondisi jalan. Berbagai program peningkatan kualitas jalan, seperti rehabilitasi, pemeliharaan rutin, dan pembangunan jalan baru, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan rasio kemantapan. Perkembangan Rasio kemantapan jalan secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

Gambar 2.7 Rasio Kemantapan Jalan

Selain berfokus pada pembangunan dan peningkatan jalan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan juga membangun sarana pendukung lainnya seperti halnya peningkatan jalan dan penataan kawasan bandara meliputi peningkatan kapasitas jalan berupa pelebaran dan penambahan lajur lalu lintas dan penataan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari upaya penyediaan fasilitas umum. Selain dilakukan penataan pada Kawasan Bandara yang menyediakan ruang terbuka hijau untuk menciptakan lingkungan yang lebih sejuk dan nyaman, perhatian juga diberikan pada pengembangan kawasan tepi laut yang kini dikenal dengan nama Kawasan Gurindam 12.

Kawasan ini dirancang menjadi sebuah area terpadu yang tidak hanya memperindah pemandangan pesisir, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. Dalam penataannya, kawasan Gurindam 12 mengusung konsep multifungsi, di mana terdapat berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi. Di sisi sosial, kawasan ini dilengkapi dengan *jogging track* yang ramah bagi para pengunjung dan warga lokal yang ingin berolahraga atau sekadar menikmati udara segar sambil berjalan di sepanjang tepi laut. Fasilitas ini dirancang untuk mendorong gaya hidup sehat dan menjadi ruang berkumpul yang menyenangkan bagi berbagai kalangan usia.



Sementara itu, dari segi ekonomi, kawasan Gurindam 12 memberikan ruang khusus bagi pedagang kaki lima (PKL) untuk menjalankan usaha mereka dengan tertib dan terorganisir. Penataan ini bertujuan agar para pelaku usaha mikro dapat berjualan dengan nyaman tanpa mengganggu fungsi utama kawasan, sekaligus menambah daya tarik ekonomi lokal. Dengan adanya integrasi antara ruang sosial dan ekonomi tersebut, Kawasan Gurindam 12 tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar.

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau adalah perencanaan Detail Engineering Design (DED) untuk proyek Flyover di Simpang Kota Piring. Tahap perencanaan ini merupakan langkah penting yang akan menjadi dasar pelaksanaan konstruksi flyover tersebut. Flyover Simpang Kota Piring dirancang untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas yang selama ini menjadi kendala utama di kawasan tersebut, terutama pada jam-jam sibuk.

Kepadatan kendaraan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi di daerah ini menyebabkan arus lalu lintas sering mengalami kemacetan parah yang berdampak negatif terhadap mobilitas masyarakat serta efektivitas waktu perjalanan. Dengan adanya flyover ini, diharapkan akan tercipta sistem lalu lintas yang lebih lancar dan efisien, karena kendaraan dapat melewati persimpangan tanpa harus berhenti lama menunggu lampu lalu lintas atau antrean kendaraan yang padat.

Selain berfungsi sebagai solusi untuk mengurai kemacetan, pembangunan flyover ini juga bertujuan untuk memberikan pelayanan transportasi yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Infrastruktur yang modern dan dirancang dengan standar keselamatan tinggi diharapkan mampu mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di kawasan Simpang Kota Piring. Lebih dari itu, flyover ini juga akan menjadi salah satu simbol kemajuan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan konektivitas antarwilayah dan memperlancar distribusi barang serta jasa. Dengan demikian, pelaksanaan konstruksi flyover Simpang Kota Piring tidak hanya sekadar penyelesaian masalah lalu lintas, tetapi juga merupakan bagian dari upaya strategis



pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah ini.

Selain pembangunan dan peningkatan jalan yang sudah dilaksanakan, pemerintah juga melaksanakan pembangunan jembatan sebagai salah satu upaya menyediakan konektivitas antar daerah antara lain pembangunan Jembatan Desa Marok Tua dengan panjang 0,10 km di Kabupaten Lingga pada tahun 2022. Pembangunan Jembatan Sekunyam-Pian Tengah di Kabupaten Natuna dengan panjang pengerjaan 0,19 km di 2 titik lokasi box dengan dimensi 3 x 3 sejumlah 3 unit dan dimensi 3 x 4 sejumlah 4 unit dilaksanakan pada tahun 2023. Jembatan ini menjadi akses utama antar desa.

Pada tahun 2025 dilaksanakan juga dua proyek strategis pembangunan jembatan yaitu jembatan Semala dan rekontruksi Pelantar II. Jembatan Semala berlokasi di ruas jalan Batubi-Klarik Kabupaten Natuna dengan panjang penanganan 30 meter dan lebar 9 meter, diharapkan dengan adanya pembangunan Jembatan Semala, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat tidak terganggu apabila terjadi cuaca ekstrim. Selain itu, terdapat juga pekerjaan Rekonstruksi Pelantar II, Kota Tanjungpinang yang menjadi salah satu prioritas pembangunan karena Pelantar II merupakan salah satu pusat perkonomian di Kota Tanjungpinang. Rekonstruksi Pelantar II dengan dimensi 24,2 x 6 meter.

Tidak kalah penting juga rencana pembangunan Jembatan Batam - Bintan (Babin) yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Untuk mendukung rencana tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan melaksanakan reviu DED Jembatan Babin yang mengakomodir hasil *soil investigation* yang sudah dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau pada tahun 2024 sehingga hasil reviu tersebut diharapkan menciptakan desain yang lebih akurat.

h. Persampahan

Peningkatan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi beserta kegiatan pembangunan yang terus meningkat akan menimbulkan bangkitan sampah, baik berupa limbah domestik maupun limbah industri. Penanganan limbah domestik saat ini umumnya masih dilakukan secara konvensional dengan sistem pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).



Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam sub urusan persampahan adalah pelaksanaan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional/kawasan. Artinya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab untuk membangun, mengembangkan, serta memastikan keberfungsian sarana dan prasarana persampahan berskala provinsi maupun lintas kabupaten/kota. Hal ini penting mengingat pengelolaan persampahan tidak hanya berhenti pada level lokal, melainkan memerlukan pendekatan regional agar efisiensi, keberlanjutan, dan dampak lingkungan dapat lebih terkontrol.

Fasilitas pengelolaan persampahan di tiap kabupaten/kota juga mencakup Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Namun, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan.

i. Jasa Konstruksi

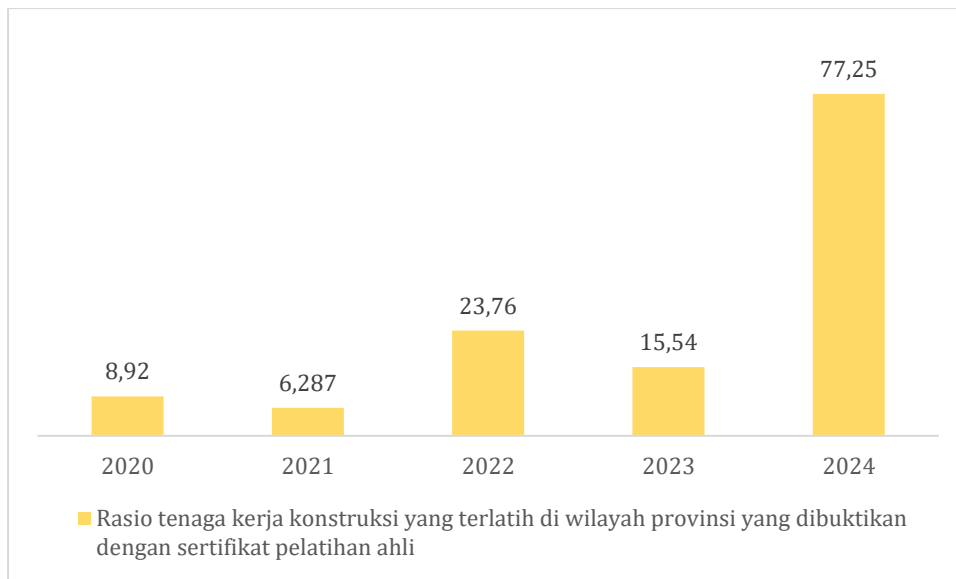
Capaian kinerja indikator rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rasio tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat pelatihan ahli tercatat sebesar 8,92 persen. Namun, angka ini justru menurun pada tahun 2021 menjadi 6,287 persen, menunjukkan adanya hambatan atau penurunan partisipasi dalam program pelatihan tenaga kerja konstruksi saat itu, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat kegiatan pelatihan dan sertifikasi.

Memasuki tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 23,76 persen. Kenaikan ini menandakan adanya upaya pemulihan dan peningkatan intensitas program pelatihan pascapandemi. Meski demikian, angka tersebut kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 15,54 persen, yang mungkin mencerminkan tantangan keberlanjutan program atau keterbatasan sumber daya.

Peningkatan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2024, dengan rasio mencapai 77,25 persen. Ini merupakan capaian tertinggi dalam periode lima tahun terakhir, yang menunjukkan adanya percepatan pelatihan tenaga kerja konstruksi secara masif dan terstruktur. Peningkatan ini bisa jadi hasil dari kebijakan strategis

pemerintah provinsi maupun pusat yang menargetkan peningkatan kualitas SDM sektor konstruksi melalui program sertifikasi keahlian secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan, Provinsi Kepulauan Riau berhasil mendorong peningkatan signifikan dalam profesionalisme tenaga kerja konstruksi di tahun terakhir, yang diharapkan berdampak pada kualitas pembangunan infrastruktur yang lebih baik ke depannya.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

Gambar 2.8 Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

j. Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dokumen perencanaan spasial yang memuat arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah dalam jangka waktu tertentu dan berperan strategis dalam mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan, terpadu, dan berwawasan lingkungan. Pada tingkat provinsi, RTRW menjadi acuan penting bagi sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan wilayah, serta dasar hukum dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, proses revisi RTRW secara berkala menjadi hal krusial agar dokumen tersebut tetap selaras dengan kebijakan nasional, perkembangan wilayah, serta tantangan aktual di lapangan.

Pada indikator Persentase proses Revisi RTRW Provinsi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan



capaian yang semakin meningkat selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 capaian berada pada angka 85 persen, kemudian naik menjadi 90 persen di tahun 2023, dan mencapai 92 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen dan kemajuan yang signifikan dari sebagian besar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memperbarui RTRW-nya sesuai ketentuan perundang-undangan.

k. Pertanahan

Kinerja indikator bidang pertanahan dan tata ruang Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu menunjukkan kinerja yang sangat baik dan stabil dengan capaian 100 persen setiap tahunnya dari 2020 hingga 2024. Capaian ini mengindikasikan adanya tata kelola yang baik dalam pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga koordinasi lintas pihak yang terlibat. Keberhasilan ini patut dipertahankan sebagai praktik terbaik dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang tepat waktu.

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2021-2026 berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10.
Capaian Indikator Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir	Ha				75	150	150				195	260,00



No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%) 2024
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%				25,49	31,48	37,46				10,26	40,25
3	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%				58,99	62,09	65,39				55,79	94,58
4	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	%				100	100	100		68,75	100	100	100,00
5	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%				100	100	100					-
6	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%				80,94	81,1	81,26				80,87	99,91
7	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%				91,88	92	92,12	90,82	91,82	91,92	91,10	112,10
8	Cakupan pelayanan air limbah	%				90,51	90,68	90,91	91,62	87,74	91,1	91,23	100,80
9	Cakupan pelayanan drainase	%				54,3	57,3	60,3				50,79	93,54
10	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda	%				85	93	100		85	90	92	108,24
11	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi	%				100	100	100					-



No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%) 2024
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%					100	100			100	100	
13	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	%				100	100	100		100	100	100	-
14	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%				26	28	30		23,76	15,54	77,52	298,15
15	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi	%				100	100	100		100	100	100	100,00
16	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	%				100	100	100		100	100	100	100,00

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur yang andal, tertata, dan berkelanjutan, serta menjamin tertib tata ruang dan kepastian hukum atas tanah. Untuk itu, kelompok sasaran layanan yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan meliputi berbagai pemangku kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.



Kelompok sasaran utama meliputi masyarakat umum, khususnya warga yang terdampak langsung oleh pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, jaringan air minum, serta rehabilitasi permukiman. Pemerintah daerah juga menjadi kelompok sasaran penting, terutama dalam layanan penyusunan dokumen perencanaan teknis, rencana tata ruang wilayah, serta penyediaan data pertanahan dan layanan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selain itu, pelaku usaha dan investor turut menjadi sasaran layanan dalam hal penyediaan infrastruktur pendukung kawasan industri, perizinan tata ruang, dan kemudahan aksesibilitas wilayah.

Kelompok lainnya adalah komunitas dan organisasi masyarakat, yang dilibatkan dalam proses perencanaan partisipatif dan pengawasan pembangunan, serta lembaga pendidikan dan profesional, yang menjadi mitra dalam pengembangan kapasitas, pelatihan teknis, serta inovasi tata ruang dan konstruksi. Dalam bidang pertanahan, kelompok sasaran mencakup masyarakat pemilik dan pengelola tanah, baik individu maupun kelompok, yang membutuhkan kepastian status hukum dan informasi geospasial atas bidang tanahnya.

2.1.5 Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi strategisnya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau membangun sinergi dengan berbagai mitra, baik dari lingkup perangkat daerah, instansi vertikal, maupun pihak eksternal. Kemitraan ini menjadi fondasi penting dalam menjawab tantangan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, memperkuat pengelolaan ruang, dan memastikan layanan pertanahan berjalan optimal.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan sejumlah mitra strategis di antaranya PERUMDA Tirta Kepri dan PERUMDA Tirta Karimun, yang menjadi mitra dalam penyediaan dan pengelolaan air minum di kawasan perkotaan dan permukiman strategis.

Dalam bidang pertanahan, kemitraan erat dijalin dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau serta Kantor Pertanahan di masing-masing Kabupaten/Kota dalam hal pengadaan tanah untuk proyek strategis, pemetaan bidang tanah, serta penyelesaian konflik agraria.



Dengan memperkuat jejaring kemitraan ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang kolaboratif, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di wilayah kepulauan yang dinamis dan berkembang.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau bersinergi dengan PERUMDA Tirta Kepri melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Kepri sebagai BUMD penyedia layanan air minum untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan berkelanjutan.

PERUMDA Tirta Kepri memiliki peran strategis dalam mendukung program prioritas Pemerintah Daerah terkait penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui pembangunan dan optimalisasi infrastruktur air baku, instalasi pengolahan air (IPA), serta jaringan distribusi ke wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal. Fokus utama diarahkan pada wilayah perkotaan, kawasan permukiman padat penduduk, kawasan industri, serta pulau-pulau kecil yang selama ini mengalami keterbatasan akses air minum. PERUMDA Tirta Kepri turut mengimplementasikan teknologi modern dalam sistem pelayanan air minum, seperti sistem pemantauan tekanan air berbasis digital dan optimalisasi jaringan distribusi untuk menekan tingkat kehilangan air (non-revenue water/NRW).

Dukungan PERUMDA Tirta Kepri, diharapkan target peningkatan cakupan layanan air minum layak dan aman di Provinsi Kepulauan Riau dapat tercapai sesuai dengan target pembangunan jangka menengah daerah dan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya target 6.1 tentang akses universal terhadap air minum aman.



2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang representatif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Belum optimalnya kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi pada penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum Penataan Ruang dan pertanahan.
3. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, monitoring, dan evaluasi dari pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.
4. Masih rendahnya rasio kawasan permukiman pesisir yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai, sebagaimana terlihat dari capaian yang belum optimal dari 90,76 persen pada tahun 2021 menjadi hanya 0,23 persen pada tahun 2024.
5. Belum optimalnya cakupan air minum curah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, yang tercermin dari turunnya cakupan pelayanan dari 53,52 persen pada tahun 2023 menjadi 33,51 persen pada tahun 2024.
6. Belum optimalnya pemenuhan cakupan akses terhadap air minum layak pada kabupaten/kota.
7. Belum optimalnya pemenuhan cakupan akses terhadap sanitasi layak pada kabupaten/kota.
8. Masih rendahnya rasio kawasan permukiman rawan banjir yang memiliki infrastruktur pengendali banjir, dengan capaian hanya 0,01 persen pada tahun 2024.
9. Belum optimalnya tingkat kemantapan jalan provinsi. Rasio kemantapan jalan baru mencapai 80,87 persen pada tahun 2024 menunjukkan masih adanya kebutuhan peningkatan kualitas dan cakupan jalan untuk mendukung konektivitas antarwilayah.
10. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional/Kawasan.
11. Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja konstruksi bersertifikat, yang ditunjukkan capaian yang turun dari 23,76 persen pada tahun 2022 menjadi 15,5 persen pada 2023, meskipun meningkat drastis menjadi 77,25 persen pada 2024.



12. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
13. Belum optimalnya fasilitasi pengadaan tanah untuk mendukung Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

2.2.2 Isu strategis

Isu strategis yang disajikan dalam dokumen ini diperoleh melalui proses analisis mendalam terhadap kondisi internal maupun eksternal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Teknik yang digunakan adalah penyimpulan isu strategis, yaitu dengan mengkaji potensi, permasalahan, serta dinamika lingkungan yang relevan. Hasil penyimpulan tersebut kemudian disarikan menjadi isu-isu utama yang berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan demikian, isu-isu strategis yang telah disimpulkan menjadi dasar utama dalam perumusan tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun teknik menyimpulkan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11.
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

Potensi yang menjadi Kewenangan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedianya SDM ASN dan Non ASN untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas perencanaan.	- Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang representatif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. - Belum optimalnya	- Kurangnya pemenuhan akses sanitasi layak - Kurangnya pemenuhan akses air minum yang aman	- Transformasi Tata Kelola - Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan	Disrupsi Teknologi	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal	Belum efektifnya tata kelola dinas dalam mendukung pelayanan tugas dan fungsi.



Potensi yang menjadi Kewenangan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi pada penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum Penataan Ruang dan pertanahan • Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, monitoring, dan evaluasi dari pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.					
1. Tersedianya dukungan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur strategis 2. Memiliki Kewenangan di tingkat provinsi untuk mengelola infrastruktur 3. Memiliki kewenangan di Tingkat provinsi untuk mengelola tata ruang 4. Memiliki kewenangan di Tingkat Provinsi dalam penyelenggaraan pertanahan 5. Dukungan mitra strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 6. Tersediannya dokumen perencanaan (RTRW Provinsi,	9. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang representatif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. 10. Belum optimalnya kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi pada penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum Penataan Ruang dan pertanahan. 11. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, monitoring, dan evaluasi dari pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. 12. Masih rendahnya rasio kawasan permukiman pesisir yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai, sebagaimana terlihat dari		▪ Transformasi Ekonomi ▪ Transformasi Sosial	Urbanisasi Dunia	Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata dan Terintegrasi	1. Belum optimalnya kualitas, cakupan, dan pemerataan infrastruktur dasar untuk mendukung pelayanan publik, dan pertumbuhan wilayah 2. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan 3. Belum optimalnya dukungan fasilitasi pengadaan tanah dalam mendukung pembangunan daerah



Potensi yang menjadi Kewenangan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
RDTR, dan dokumen teknis lainnya) 7. Akses terhadap tenaga kerja konstruksi 8. Adaya aset tanah milik pemerintah provinsi	capaian yang belum optimal dari 90,76 persen pada tahun 2021 menjadi hanya 0,23 persen pada tahun 2024. 13. Belum optimalnya cakupan air minum curah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, yang tercermin dari turunnya cakupan pelayanan dari 53,52 persen pada tahun 2023 menjadi 33,51 persen pada tahun 2024. 14. Belum optimalnya pemenuhan cakupan akses terhadap air minum layak pada kabupaten/kota. 15. Belum optimalnya pemenuhan cakupan akses terhadap sanitasi layak pada kabupaten/kota. 16. Masih rendahnya rasio kawasan permukiman rawan banjir yang memiliki infrastruktur pengendali banjir, dengan capaian hanya 0,01 persen pada tahun 2024. 17. Belum optimalnya tingkat kemantapan jalan provinsi. Rasio kemantapan jalan baru mencapai 80,87 persen pada tahun 2024 menunjukkan masih adanya kebutuhan peningkatan kualitas dan cakupan jalan untuk mendukung konektivitas antarwilayah. 18. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan					



Potensi yang menjadi Kewenangan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional/Kawasan. 19. Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja konstruksi bersertifikat, yang ditunjukkan capaian yang turun dari 23,76 persen pada tahun 2022 menjadi 15,5 persen pada 2023, meskipun meningkat drastis menjadi 77,25 persen pada 2024. 20. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. 21. Belum optimalnya fasilitasi pengadaan tanah untuk mendukung Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.					

Isu Strategis dalam pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Belum efektifnya tata kelola dinas dalam mendukung pelayanan tugas dan fungsi.
2. Belum optimalnya kualitas, cakupan, dan pemerataan infrastruktur dasar untuk mendukung pelayanan publik, dan pertumbuhan wilayah
3. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan
4. Belum optimalnya dukungan fasilitasi pengadaan tanah dalam mendukung Pembangunan daerah.



BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam arah pembangunan sektoral, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau menyusun tujuan dan sasaran strategis sebagai bagian penting dari Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah untuk periode 2025–2029. Penyusunan tujuan dan sasaran ini mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029, yang menekankan pentingnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta agenda pembangunan nasional lainnya.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau perlu memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN tahun 2025-2029, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital diarahkan untuk mendukung prioritas nasional, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat. Pembangunan infrastruktur, pengembangan industri kreatif, dan industri agromaritim bertujuan mendukung pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan mendorong kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi. Infrastruktur yang terintegrasi akan meningkatkan akses, menurunkan biaya logistik, memperkuat konektivitas, dan mendorong pengembangan industri kreatif serta pariwisata. Dalam lima tahun ke depan, fokus pembangunan mencakup penyediaan air, perumahan, sanitasi, transportasi, ketenagalistrikan, dan transformasi digital, dengan pendekatan berbasis alam untuk mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim. Upaya



ini juga mendukung pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal, agro-maritim, dan ekosistem ekonomi kreatif untuk memperkuat citra bangsa. Pemerintah berkomitmen melanjutkan pengembangan ini dengan melibatkan koperasi dan memanfaatkan sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan.

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah oleh Dinas, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Tujuan ini menggambarkan arah strategis pembangunan sektor pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang akan ditempuh dalam lima tahun ke depan. Sementara itu, sasaran merupakan penjabaran yang lebih terukur dari tujuan, yang menunjukkan capaian hasil spesifik yang ingin diwujudkan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Sasaran dirumuskan dengan memperhatikan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), serta mengintegrasikan indikator kinerja yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Telaah terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan secara konsisten, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. NSPK menjadi acuan teknis dan administratif yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan dalam menyusun kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan urusan pemerintahan konkuren yang terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, Dinas mengacu pada NSPK yang ditetapkan oleh kementerian terkait, seperti:

1. Pekerjaan Umum

a. Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.



- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

b. Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, Dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, Serta Ketentuan-Ketentuan dan Penguasaannya.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

c. Peraturan Presiden/Instruksi Presiden

- 1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- 2) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan

d. Peraturan Menteri

- 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.



- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2011 Tentang Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus.
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan.
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan.
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Jalan.
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan.
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
- 9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- 10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan Dan Preservasi Jalan
- 11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- 12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
- 14) Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum.
- 15) Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jalan.



- 16) Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar dan Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan.
- 18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- 19) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan.
- 20) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan.
- 21) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 22) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

e. Standar SNI dan pedoman teknis lainnya yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan Kementerian PUPR

2. Penataan Ruang

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah.
- 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Rencana Detail Tata Ruang dan Perizinan Berbasis OSS.



3. Pertanahan

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.
- 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Tanah untuk Penataan Akses Reforma Agraria.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau juga menelaah NSPK yang bersifat lintas sektor seperti:

1. **Permendagri Nomor 86 Tahun 2017** dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah



2. **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025** sebagai acuan penyusunan Renstra perangkat daerah periode 2025–2029

Telaah terhadap NSPK dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan yang dirumuskan yang direncanakan dalam Renstra telah mengacu pada standar teknis dan prosedur yang berlaku nasional, serta untuk mendukung keterpaduan kebijakan pusat dan daerah. Dengan berpedoman pada NSPK, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dapat menjaga kualitas hasil pembangunan, efisiensi penggunaan anggaran, serta akuntabilitas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan.

Tujuan Renstra merupakan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan atau memperhatikan sasaran RPJMD. Sasaran merupakan rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya kualitas infrastruktur publik. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Kepulauan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan pembangunan strategis daerah.



Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan											
- Meningkatkan kualitas infrastruktur publik	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik		Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (%)	45,03	51,44	52,65	54,40	56,14	57,87	59,56	
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan pembangunan strategis daerah.	Rasio Capaian Infrastruktur ke-Puan (%)	0	38,19	42,64	40	42,86	43,76	45,90	
			Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)	0	0	45	20,53	20,53	6,88	6,88	



3.2 Strategi

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan/sub kegiatan alam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Strategi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana lintas kabupaten/kota secara berkelanjutan.
2. Memperkuat sistem penataan ruang wilayah provinsi yang adaptif dan terintegrasi melalui penyusunan dan revisi RTRW yang partisipatif, berbasis data spasial, dan selaras dengan kebijakan nasional.
3. Meningkatkan pemanfaatan dan penataan bangunan serta kawasan strategis melalui penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan yang berorientasi pada ketahanan wilayah, dan kenyamanan ruang publik.
4. Meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi pengadaan tanah untuk pembangunan strategis daerah melalui fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah yang tepat waktu dan koordinatif antar pemangku kepentingan.
5. Mengoptimalkan pengelolaan pertanahan untuk mendukung pembangunan dan ketertiban administrasi melalui pendataan, sertifikasi aset, penyelesaian sengketa, dan redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota secara sistematis dan transparan.

Keterkaitan Strategi dengan tujuan dan sasaran Renstra Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :



Tabel 3.2.
Strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan pembangunan strategis daerah.	1. Meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana lintas kabupaten/kota secara berkelanjutan. 2. Memperkuat sistem penataan ruang wilayah provinsi yang adaptif dan terintegrasi melalui penyusunan dan revisi RTRW yang partisipatif, berbasis data spasial, dan selaras dengan kebijakan nasional. 3. Meningkatkan pemanfaatan dan penataan bangunan serta kawasan strategis melalui penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan yang berorientasi pada ketahanan wilayah, dan kenyamanan ruang publik. 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan terpenuhinya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 5. Meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi pengadaan tanah untuk pembangunan strategis daerah melalui fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah yang tepat waktu dan koordinatif antar pemangku kepentingan. 6. Mengoptimalkan pengelolaan pertanahan untuk mendukung pembangunan dan ketertiban administrasi melalui pendataan, sertifikasi aset, penyelesaian sengketa, dan redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota secara sistematis dan transparan.

Pentahapan Prioritas Renstra Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 hingga tahun 2030 sebagai berikut :



Tabel 3.3.
Tahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemutakhiran baseline infrastruktur, review rencana tata ruang, pemetaan kebutuhan pengadaan tanah, dan identifikasi infrastruktur Ke-Puan.	Percepatan Pembangunan Prioritas infrastruktur	Integrasi RTRW dengan dokumen kebijakan lainnya dan penguatan implementasi pengendalian pemanfaatan ruang	Penguatan infrastruktur dan pertanahan berbasis spasial	Tercapainya kualitas pekerjaan umum yang mantap, penataan ruang yang tertib dan terpenuhinya kebutuhan tanah untuk mendukung pembangunan

3.3 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur dengan fokus pada penguatan perlindungan wilayah pesisir dan pengendalian banjir secara regional, peningkatan kapasitas dan keberlanjutan layanan irigasi lintas wilayah, perluasan cakupan akses air minum, pembangunan sistem air limbah regional yang terintegrasi, pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase regional, penataan bangunan dan lingkungannya, peningkatan fungsi dan kualitas bangunan strategis provinsi dan kemantapan jaringan jalan provinsi.
2. Penyelenggaraan penataan ruang dengan fokus pada sinkronisasi kebijakan tata ruang dengan RTRW nasional dan kabupaten/kota, penguatan basis data spasial, serta penyusunan RDTR prioritas provinsi.
3. Peningkatan pengelolaan pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau dengan fokus pada percepatan penetapan lokasi dan penyelesaian pengadaan tanah strategis provinsi, dan inventarisasi aset tanah.



Tabel 3.4.
Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota	1. Pemenuhan Air Minum dan sanitasi untuk rumah tangga	1. Peningkatan kualitas infrastruktur dengan fokus pada penguatan perlindungan wilayah pesisir dan pengendalian banjir secara regional, peningkatan kapasitas dan keberlanjutan layanan irigasi lintas wilayah, perluasan cakupan akses air minum, pembangunan sistem air limbah regional yang terintegrasi, pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase regional, penataan bangunan dan lingkungannya, peningkatan fungsi dan kualitas bangunan strategis provinsi dan kemandapan jaringan jalan provinsi.
2.	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi 1.000–3.000 ha dan lintas kabupaten/kota		
3.	Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota		
4.	Pengelolaan sistem air limbah domestik regional		
5.	Pengelolaan sistem persampahan regional		
6.	Pengelolaan sistem drainase lintas kabupaten/kota		
7.	Penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi		
8.	Penetapan bangunan gedung strategis provinsi		
9.	Penyelenggaraan bangunan gedung strategis provinsi		
10.	Penataan bangunan dan lingkungan strategis dan lintas kabupaten/kota		
11.	Penyelenggaraan jalan provinsi	2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	
12.	Pelatihan tenaga ahli konstruksi		
13.	Sistem informasi jasa konstruksi provinsi		
14.	Penataan ruang daerah provinsi		
15.	Izin lokasi lintas kabupaten/kota dalam provinsi		
			2. Penyelenggaraan penataan ruang dengan fokus pada sinkronisasi kebijakan tata ruang dengan RTRW nasional dan kabupaten/kota, penguatan basis data spasial, serta penyusunan RDTR prioritas provinsi.
			3. Peningkatan pengelolaan pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau dengan fokus pada



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi		percepatan penetapan lokasi dan penyelesaian pengadaan tanah strategis provinsi, dan inventarisasi aset tanah
17.	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota		
18.	Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan provinsi		
19.	Redistribusi tanah dan penyelesaian tanah absentee lintas kabupaten/kota		
20.	Penetapan tanah ulayat lintas kabupaten/kota		
21.	Penyelesaian tanah kosong lintas kabupaten/kota		
22.	Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas kabupaten/kota		
23.	Perencanaan penggunaan tanah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi		
24.	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik sesuai kewenangan provinsi		



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Rincian Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1.03.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.03.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.03.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.03.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.03.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.03.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.03.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.03.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.03.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

1.03.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.03.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.03.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.03.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.03.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.03.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.03.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.03.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.03.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu

1.03.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.03.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.03.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD



1.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.03.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.03.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.03.01.1.07.0003 - Pengadaan Alat Besar

1.03.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.03.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya

1.03.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.03.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.03.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.03.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.03.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.03.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.03.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.03.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.03.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.03.01.1.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

1.03.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.03.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

1.03.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.03.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1.03.02.1.01.0071 - Rehabilitasi Bendungan

1.03.02.1.01.0121 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

1.03.02.1.01.0130 - Pembangunan Embung

1.03.02.1.01.0137 - Operasi dan Pemeliharaan Embung

1.03.02.1.01.0009 - Pembangunan Tanggul Sungai



1.03.02.1.01.0075 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi

1.03.02.1.01.0079 - Normalisasi/Restorasi Sungai

1.03.02.1.01.0097 - Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir

1.03.02.1.01.0098 - Pembangunan Kanal Banjir

1.03.02.1.01.0107 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai

1.03.02.1.01.0122 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai

1.03.02.1.01.0124 - Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai

1.03.02.1.01.0127 - Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai

1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1.03.02.1.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

1.03.02.1.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

1.03.03.1.01.0014 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota

1.03.03.1.01.0017 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

1.03.03.1.01.0018 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

1.03.03.1.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

1.03.03.1.01.0020 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

1.03.03.1.01.0021 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

1.03.03.1.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

1.03.03.1.01.0026 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.1.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

1.03.04.1.01.0012 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota

1.03.04.1.01.0013 - Pembangunan TPA/TPST/SPA

1.03.04.1.01.0016 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan



1.03.04.1.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA

1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

1.03.05.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional

1.03.05.1.01.0013 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat

1.03.05.1.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

1.03.05.1.01.0016 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota

1.03.05.1.01.0022 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota

1.03.05.1.01.0023 - Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi

1.03.06.1.01.0008 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

1.03.06.1.01.0010 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

1.03.06.1.01.0011 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan

1.03.06.1.01.0012 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

1.03.08.1.01.0013 - Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara

1.03.08.1.01.0015 - Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara

1.03.08.1.01.0016 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

1.03.08.1.01.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

1.03.08.1.01.0019 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

1.03.08.1.01.0020 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

1.03.09.1.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1.03.09.1.01.0014 - Pendampingan Legalisasi Perencanaan Teknis dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota



1.03.09.1.01.0017 - Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1.03.09.1.01.0018 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota

1.03.09.1.01.0019 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1.03.09.1.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1.03.09.1.01.0017 - Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1.03.09.1.01.0018 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota

1.03.09.1.01.0019 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi

1.03.10.1.01.0030 - Rehabilitasi Jalan

1.03.10.1.01.0031 - Rekonstruksi Jalan

1.03.10.1.01.0035 - Pelebaran Jalan Menambah Lajur

1.03.10.1.01.0041 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

1.03.10.1.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan

1.03.10.1.01.0044 - Pengelolaan Leger Jalan

1.03.10.1.01.0045 - Pemeliharaan Rutin Jalan

1.03.10.1.01.0047 - Pemeliharaan Berkala Jembatan

1.03.10.1.01.0051 - Pelebaran Jalan Menuju Standar

1.03.10.1.01.0052 - Rehabilitasi Jembatan

1.03.10.1.01.0053 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi

1.03.10.1.01.0054 - Pembangunan Jembatan

1.03.10.1.01.0055 - Pembangunan Flyover

1.03.10.1.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan

1.03.10.1.01.0057 - Pemeliharaan Rutin Jembatan

1.03.10.1.01.0058 - Pembangunan Jalan

1.03.10.1.01.0059 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi

1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

1.03.11.1.01.0009 - Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

1.03.11.1.01.0010 - Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli

1.03.11.1.01.0011 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli



- 1.03.11.1.01.0012 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
- 1.03.11.1.01.0013 - Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
- 1.03.11.1.01.0014 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
- 1.03.11.1.01.0015 - Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
- 1.03.11.1.01.0016 - Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- 1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)**
Cakupan Daerah Provinsi
 - 1.03.11.1.02.0006 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
 - 1.03.11.1.02.0007 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
 - 1.03.11.1.02.0008 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
 - 1.03.11.1.02.0009 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI
- 1.03.11.1.03 - Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**
 - 1.03.11.1.03.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
 - 1.03.11.1.03.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
 - 1.03.11.1.03.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
 - 1.03.11.1.03.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
 - 1.03.11.1.03.0008 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi
- 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**
 - 1.03.12.1.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**
 - 1.03.12.1.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
 - 1.03.12.1.01.0005 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
 - 1.03.12.1.01.0006 - Penetapan RTRW Provinsi
 - 1.03.12.1.01.0007 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi
 - 1.03.12.1.01.0009 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang
 - 1.03.12.1.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**
 - 1.03.12.1.02.0006 - Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
 - 1.03.12.1.02.0009 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota
 - 1.03.12.1.02.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
 - 1.03.12.1.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi**
 - 1.03.12.1.03.0004 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 1.03.12.1.03.0006 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang



1.03.12.1.03.0007 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

1.03.12.1.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi

1.03.12.1.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang

1.03.12.1.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

1.03.12.1.04.0005 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang

1.03.12.1.04.0006 - Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat

1.03.12.1.04.0007 - Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan

1.03.12.1.04.0011 - Penilaian Perwujudan RTR

1.03.12.1.04.0014 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMKÂ

1.03.12.1.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal

2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

2.10.03.1.01 - Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi

2.10.03.1.01.0002 - Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

2.10.03.1.01.0003 - Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

2.10.03.1.01.0004 - Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum

2.10.03.1.01.0005 - Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

2.10.03.1.01.0006 - Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

2.10.06.1.01 - Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.10.06.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan							
- Meningkatkan kualitas infrastruktur publik	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik				Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (%)		
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan pembangunan strategis daerah.			Rasio Capaian Infrastruktur ke-Puan (%)		
					Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)		



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang transparan dan akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.03.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.03.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	1.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	1.03.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.03.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.03.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.03.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.03.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.03.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.03.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.03.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.1.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlindungnya Bangunan Pengendali Banjir/Bangunan Perkuatan Tebing/Pengaman Pantai/Normalisasi/Restorasi	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun (KM)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara (KM)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	1.03.02.1.01.0009 - Pembangunan Tanggul Sungai	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	1.03.02.1.01.0075 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1.03.02.1.01.0079 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
					Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.1.01.0097 - Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	
					Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)	1.03.02.1.01.0098 - Pembangunan Kanal Banjir	
					Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	1.03.02.1.01.0107 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.1.01.0122 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
					Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara (KM)	1.03.02.1.01.0124 - Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	
					Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun (KM)	1.03.02.1.01.0127 - Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	
				Tersedianya Kapasitas Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi (Bendungan)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Embung yang dibangun (Unit)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi (Bendungan)	1.03.02.1.01.0071 - Rehabilitasi Bendungan	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.1.01.0121 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
					Jumlah Embung yang dibangun (Unit)	1.03.02.1.01.0130 - Pembangunan Embung	
					Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)	1.03.02.1.01.0137 - Operasi dan Pemeliharaan Embung	
				Terbangunya Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1.03.02.1.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.1.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen)	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kabupaten/Kota)	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kabupaten/Kota)	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kabupaten/Kota)	1.03.03.1.01.0014 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.03.1.01.0017 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1.03.03.1.01.0018 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)	1.03.03.1.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.03.1.01.0020 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kabupaten/Kota)	1.03.03.1.01.0021 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen)	1.03.03.1.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	1.03.03.1.01.0026 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan persampahan regional		Persentase Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota (%)	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan yang dibangun dan direhabilitasi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1.03.04.1.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan (Kabupaten/Kota)	1.03.04.1.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
					Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan (Unit)	1.03.04.1.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun (Ton/hari)	1.03.04.1.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan (Kabupaten/Kota)	1.03.04.1.01.0012 - Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun (Ton/hari)	1.03.04.1.01.0013 - Pembangunan TPA/TPST/SPA	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1.03.04.1.01.0016 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan (Unit)	1.03.04.1.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	
			Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Terpenuhinya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen legal yang disahkan terkait perencanaan tata bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.09.1.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.09.1.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (kabupaten/kota)	1.03.09.1.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.1.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen legal yang disahkan terkait perencanaan tata bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.09.1.01.0014 - Pendampingan Legalisasi Perencanaan Teknis dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.09.1.01.0017 - Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (kabupaten/kota)	1.03.09.1.01.0018 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.1.01.0019 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Terpenuhinya Jalan Provinsi Kondisi Mantap	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Panjang Flyover yang Dibangun (Meter)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur (KM)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala (KM)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin (KM)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Meter)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.1.01.0030 - Rehabilitasi Jalan	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.1.01.0031 - Rekonstruksi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur (KM)	1.03.10.1.01.0035 - Pelebaran Jalan Menambah Lajur	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.1.01.0041 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.1.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
					Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1.03.10.1.01.0044 - Pengelolaan Leger Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin (KM)	1.03.10.1.01.0045 - Pemeliharaan Rutin Jalan	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	1.03.10.1.01.0047 - Pemeliharaan Berkala Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	1.03.10.1.01.0051 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.03.10.1.01.0052 - Rehabilitasi Jembatan	
					Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	1.03.10.1.01.0053 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.1.01.0054 - Pembangunan Jembatan	
					Panjang Flyover yang Dibangun (Meter)	1.03.10.1.01.0055 - Pembangunan Flyover	
					Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala (KM)	1.03.10.1.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Meter)	1.03.10.1.01.0057 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	1.03.10.1.01.0058 - Pembangunan Jalan	
					Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	1.03.10.1.01.0059 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%)	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi yang berkualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
					Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Orang)	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya (Lembaga)	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih (Orang)	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Orang)	1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
					Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Orang)	1.03.11.1.01.0009 - Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
					Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.1.01.0010 - Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih (Orang)	1.03.11.1.01.0011 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.11.1.01.0012 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	
					Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.1.01.0013 - Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.1.01.0014 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Orang)	1.03.11.1.01.0015 - Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya (Lembaga)	1.03.11.1.01.0016 - Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
				Tersedianya Layanan Konstruksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1.03.11.1.02.0006 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	1.03.11.1.02.0007 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.1.02.0008 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	
					Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.03.11.1.02.0009 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	
				Terpenuninya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	1.03.11.1.03 - Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	1.03.11.1.03 - Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun (Dokumen)	1.03.11.1.03 - Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	1.03.11.1.03 - Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1.03.11.1.03 - Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1.03.11.1.03.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	1.03.11.1.03.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	1.03.11.1.03.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	
					Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	1.03.11.1.03.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun (Dokumen)	1.03.11.1.03.0008 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	
			Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum		Persentase luas lahan yang di bebaskan untuk kepentingan umum (%)	2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	
				Terfasilitasinya OPD/Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya yang mengajukan permohonan penetapan lokasi	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan (Dokumen)	2.10.03.1.01 - Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	
					Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah (Dokumen)	2.10.03.1.01 - Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Dokumen)	2.10.03.1.01 - Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	
					Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Laporan)	2.10.03.1.01 - Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	
					Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Dokumen)	2.10.03.1.01 - Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Dokumen)	2.10.03.1.01.0002 - Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	
					Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah (Dokumen)	2.10.03.1.01.0003 - Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	
					Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Dokumen)	2.10.03.1.01.0004 - Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum	
					Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan (Dokumen)	2.10.03.1.01.0005 - Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	
					Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Laporan)	2.10.03.1.01.0006 - Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terwujudnya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Fasilitasi Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan riau (%)	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
				Tersedianya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria. (Berita Acara)	2.10.06.1.01 - Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria. (Berita Acara)	2.10.06.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN							
- Meningkatkan kualitas infrastruktur publik	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik				Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (%)		
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu			Rasio Capaian Infrastruktur ke-Puan (%)		



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan pembangunan strategis daerah.					
					Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)		
			Terwujudnya Tata Kelola UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan yang transparan dan akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1.03.2.10.0.00.03.0002 - UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR							
- Meningkatkan kualitas infrastruktur publik	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik				Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (%)		
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara			Rasio Capaian Infrastruktur ke-Puan (%)		



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan pembangunan strategis daerah.					
					Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)		
			Terwujudnya Tata Kelola UPTD Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur yang transparan dan akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.03.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.1.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Strategis Daerah Provinsi				
				Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.09.1.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (kabupaten/kota)	1.03.09.1.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.1.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.09.1.01.0017 - Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (kabupaten/kota)	1.03.09.1.01.0018 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.1.01.0019 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang		Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			nyaman dan aman				
				Persentase Jalan Kondisi Mantap	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin (KM)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Meter)	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
					Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin (KM)	1.03.10.1.01.0045 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Meter)	1.03.10.1.01.0057 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	1.03.10.1.01.0058 - Pembangunan Jalan	



Tabel 4.2
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				340.581.197.661,85		226.840.931.696,52		77.440.931.696,52		72.440.931.696,52		168.606.539.443,52	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				35.026.925.661,85		35.540.931.696,52		34.540.931.696,52		34.540.931.696,52		35.540.931.696,52	
Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	33.676.925.661,85	BB	33.540.931.696,52	BB	33.540.931.696,52	BB	33.540.931.696,52	BB	33.540.931.696,52	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	84,53	85,38		86,23		87,09		87,96		88,64		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,78	88,80		88,83		88,85		88,87		88,90		
1.03.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				320.000.000,00		392.725.234,00		422.725.234,00		422.725.234,00		422.725.234,00	
Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	320.000.000,00	1	392.725.234,00	1	422.725.234,00	1	422.725.234,00	1	422.725.234,00	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
1.03.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				90.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	90.000.000,00	1	120.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
1.03.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD				150.000.000,00		189.580.294,00		189.580.294,00		189.580.294,00		189.580.294,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	150.000.000,00	1	189.580.294,00	1	189.580.294,00	1	189.580.294,00	1	189.580.294,00	
1.03.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000,00		83.144.940,00		83.144.940,00		83.144.940,00		83.144.940,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	80.000.000,00	1	83.144.940,00	1	83.144.940,00	1	83.144.940,00	1	83.144.940,00	
1.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				30.620.931.696,52		25.660.216.555,52		25.073.943.910,52		25.973.943.910,52		25.973.943.910,52	
Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	30.620.931.696,52	1	25.660.216.555,52	1	25.073.943.910,52	1	25.973.943.910,52	1	25.973.943.910,52	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	79	202		202		202		202				
1.03.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				29.115.531.696,52		23.637.455.615,52		23.051.182.970,52		23.951.182.970,52		23.951.182.970,52	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	79	202	29.115.531.696,52	202	23.637.455.615,52	202	23.051.182.970,52	202	23.951.182.970,52	202	23.951.182.970,52	
1.03.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.425.400.000,00		1.939.616.000,00		1.939.616.000,00		1.939.616.000,00		1.939.616.000,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1.425.400.000,00	1	1.939.616.000,00	1	1.939.616.000,00	1	1.939.616.000,00	1	1.939.616.000,00	
1.03.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				80.000.000,00		83.144.940,00		83.144.940,00		83.144.940,00		83.144.940,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	80.000.000,00	1	83.144.940,00	1	83.144.940,00	1	83.144.940,00	1	83.144.940,00	
1.03.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.000.000,00		11.952.000,00		11.952.000,00		11.952.000,00		11.952.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	11.952.000,00	1	11.952.000,00	1	11.952.000,00	1	11.952.000,00	
1.03.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000,00		11.952.000,00		11.952.000,00		11.952.000,00		11.952.000,00	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	11.952.000,00	1	11.952.000,00	1	11.952.000,00	1	11.952.000,00	
1.03.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				110.000.000,00		170.695.238,00		170.695.238,00		170.695.238,00		170.695.238,00	
Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	16	11	110.000.000,00	11	170.695.238,00	11	170.695.238,00	11	170.695.238,00	11	170.695.238,00	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	117		117		117		117		117		
1.03.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000,00		77.650.238,00		77.650.238,00		77.650.238,00		77.650.238,00	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	117	50.000.000,00	117	77.650.238,00	117	77.650.238,00	117	77.650.238,00	117	77.650.238,00	
1.03.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				60.000.000,00		93.045.000,00		93.045.000,00		93.045.000,00		93.045.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	16	11	60.000.000,00	11	93.045.000,00	11	93.045.000,00	11	93.045.000,00	11	93.045.000,00	
1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.060.000.000,00		1.714.178.532,00		1.370.451.177,00		1.370.451.177,00		1.370.451.177,00	
Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.060.000.000,00	1	1.714.178.532,00	1	1.370.451.177,00	1	1.370.451.177,00	1	1.370.451.177,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	1		1		1		1		1		
1.03.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000,00		31.852.626,00		31.852.626,00		31.852.626,00		31.852.626,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000,00	1	31.852.626,00	1	31.852.626,00	1	31.852.626,00	1	31.852.626,00	
1.03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90.000.000,00		156.223.200,00		156.223.200,00		156.223.200,00		156.223.200,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	1	90.000.000,00	1	156.223.200,00	1	156.223.200,00	1	156.223.200,00	1	156.223.200,00	
1.03.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000,00		45.153.600,00		45.153.600,00		45.153.600,00		45.153.600,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	1	50.000.000,00	1	45.153.600,00	1	45.153.600,00	1	45.153.600,00	1	45.153.600,00	
1.03.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				65.000.000,00		127.982.100,00		127.982.100,00		127.982.100,00		127.982.100,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	65.000.000,00	1	127.982.100,00	1	127.982.100,00	1	127.982.100,00	1	127.982.100,00	
1.03.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				80.000.000,00		82.271.251,00		82.271.251,00		82.271.251,00		82.271.251,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	1	80.000.000,00	1	82.271.251,00	1	82.271.251,00	1	82.271.251,00	1	82.271.251,00	
1.03.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00		57.000.000,00		57.000.000,00		57.000.000,00		57.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1	50.000.000,00	1	57.000.000,00	1	57.000.000,00	1	57.000.000,00	1	57.000.000,00	
1.03.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				130.000.000,00		169.968.400,00		169.968.400,00		169.968.400,00		169.968.400,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	1	130.000.000,00	1	169.968.400,00	1	169.968.400,00	1	169.968.400,00	1	169.968.400,00	
1.03.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000,00		943.727.355,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	500.000.000,00	1	943.727.355,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	
1.03.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				105.000.000,00		380.000.000,00		1.080.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00	
Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	105.000.000,00	0	380.000.000,00	0	1.080.000.000,00	0	380.000.000,00	0	380.000.000,00	
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)		0				1						
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0				
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0		0		1		0		0		



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		0		1		0		1		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		1		0		1		0		
1.03.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		700.000.000,00		0,00		0,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	1	700.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.01.1.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		0,00	
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)		0	0,00		0,00		0,00	1	100.000.000,00		0,00	
1.03.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		220.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		220.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	220.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	220.000.000,00	
1.03.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		0,00	
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	
1.03.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		0,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	50.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		0,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	
1.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				855.993.965,33		4.311.164.137,00		4.511.164.137,00		4.311.164.137,00		4.311.164.137,00	
Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	855.993.965,33	1	4.311.164.137,00	1	4.511.164.137,00	1	4.311.164.137,00	1	4.311.164.137,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0		0		1		0		0		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
1.03.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000,00		21.454.200,00		21.454.200,00		21.454.200,00		21.454.200,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	21.454.200,00	1	21.454.200,00	1	21.454.200,00	1	21.454.200,00	
1.03.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000,00		779.416.083,00		779.416.083,00		779.416.083,00		779.416.083,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	700.000.000,00	1	779.416.083,00	1	779.416.083,00	1	779.416.083,00	1	779.416.083,00	
1.03.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		200.000.000,00		0,00		0,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				135.993.965,33		3.510.293.854,00		3.510.293.854,00		3.510.293.854,00		3.510.293.854,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	135.993.965,33	1	3.510.293.854,00	1	3.510.293.854,00	1	3.510.293.854,00	1	3.510.293.854,00	
1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				590.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	1	590.000.000,00	1	900.000.000,00	1	900.000.000,00	1	900.000.000,00	1	900.000.000,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		1		1		1		1		
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	8	0		2		2		2		2		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	0		0		0		0		0		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	0		3		3		3		3		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8		8		8		8		8		
1.03.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				380.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8	380.000.000,00	8	400.000.000,00	8	400.000.000,00	8	400.000.000,00	8	400.000.000,00	
1.03.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	0	0,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	
1.03.01.1.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	8	0	0,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	1	60.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.03.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
Terwujudnya Tata Kelola UPTD Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	350.000.000,00	BB	1.000.000.000,00	BB	500.000.000,00	BB	500.000.000,00	BB	1.000.000.000,00	1.03.2.10.0.00.03.0002 - UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
1.03.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		0	0,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	
1.03.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		0	0,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	
1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				350.000.000,00		630.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		540.000.000,00	
Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	350.000.000,00	1	630.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	540.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	0		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		0		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1		
1.03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000,00		150.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	0	0,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	
1.03.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				130.000.000,00		90.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		90.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1	130.000.000,00	1	90.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	90.000.000,00	
1.03.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		0	0,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	
1.03.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000,00		240.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		250.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	120.000.000,00	1	240.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	250.000.000,00	
1.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		62.400.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		248.400.000,00	
Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		0	0,00	1	62.400.000,00		11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	248.400.000,00	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0				1		1		1		



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		0		1								
1.03.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		237.400.000,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		0	0,00	1	1.000.000,00		1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	237.400.000,00	
1.03.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		56.400.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	0,00	1	56.400.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00	
1.03.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	0,00		5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
1.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0,00		165.000.000,00		69.000.000,00		69.000.000,00		69.000.000,00	
Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		0	0,00	1	165.000.000,00	1	69.000.000,00	1	69.000.000,00	1	69.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		0		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		0		1		1		1		1		
1.03.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
1.03.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		50.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		0	0,00	1	50.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	
1.03.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		10.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		0	0,00	1	10.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
1.03.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		100.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0	0,00	1	100.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	
1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0,00		92.600.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		92.600.000,00	
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		0	0,00	1	92.600.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	92.600.000,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		0		1		1		1		1		
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)		0		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		0		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		0		1		1		1		1		
1.03.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
1.03.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		37.100.000,00		37.100.000,00		37.100.000,00		37.100.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		0	0,00	1	37.100.000,00	1	37.100.000,00	1	37.100.000,00	1	37.100.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.01.1.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)		0	0,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	
1.03.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		0	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	
1.03.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		30.000.000,00		7.400.000,00		7.400.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		0	0,00	1	30.000.000,00	1	7.400.000,00	1	7.400.000,00	1	30.000.000,00	
Terwujudnya Tata Kelola UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	1.000.000.000,00	BB	1.000.000.000,00	BB	500.000.000,00	BB	500.000.000,00	BB	1.000.000.000,00	1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,78	88,80				88,83				88,85		
1.03.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		30.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	15	30.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	
1.03.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		30.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	15	30.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	
1.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				350.000.000,00		175.000.000,00		210.000.000,00		75.000.000,00		315.000.000,00	
Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)		0	350.000.000,00		175.000.000,00		210.000.000,00		75.000.000,00	1	315.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1				1				1		



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		1		0		0		1		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		0		1		1				1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		0		0		0		0		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		0				1				1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)						1						
1.03.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		0,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	0	0,00	0	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		25.000.000,00		0,00		50.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		0	0,00		0,00	1	25.000.000,00		0,00	1	50.000.000,00	
1.03.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		25.000.000,00		0,00		0,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			0,00		0,00	1	25.000.000,00		0,00		0,00	
1.03.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		30.000.000,00		10.000.000,00		25.000.000,00		40.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	30.000.000,00	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00	1	40.000.000,00	
1.03.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				0,00		20.000.000,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		0	0,00	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00		0,00	1	50.000.000,00	
1.03.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		50.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		0	0,00		0,00		0,00		0,00	1	50.000.000,00	
1.03.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				50.000.000,00		60.000.000,00		0,00		0,00		60.000.000,00	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	60.000.000,00	
1.03.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000,00		65.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	65.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	65.000.000,00	
1.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				500.000.000,00		600.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		310.000.000,00	
Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	500.000.000,00		600.000.000,00	0	100.000.000,00	1	200.000.000,00	0	310.000.000,00	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1			0		0		1				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0			1		0		0				
1.03.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				500.000.000,00		600.000.000,00		0,00		0,00		310.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	500.000.000,00	1	600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	310.000.000,00	
1.03.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		200.000.000,00		0,00	
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	0,00		0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	
1.03.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		0,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	0,00		0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0,00		95.000.000,00		70.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0	0,00	1	95.000.000,00	1	70.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	0		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0		0		0		0				
1.03.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		50.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	0	0,00	1	50.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		45.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0	0,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	
1.03.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		250.000.000,00	
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		0	150.000.000,00	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	1	250.000.000,00	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0		1		1		1				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0		1		1		1				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		2		1		1		1				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		1				



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		1		1		
1.03.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	
1.03.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
1.03.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		2	150.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.03.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	
1.03.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				4.870.000.000,00		4.870.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		10.000.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	0,098	0,113	4.870.000.000,00	0,128	4.870.000.000,00	0,153	2.000.000.000,00	0,178	2.000.000.000,00	0,203	10.000.000.000,00	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	10,26	24,49		27,55		30,52		33,40		36,21		
	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	60,76	79,70		82,48		85,19		87,87		90,37		
1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4.870.000.000,00		4.240.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		9.000.000.000,00	
Terlindungnya Bangunan Pengendali Banjir/Bangunan Perkuatan Tebing/Pengaman Pantai/Normalisasi/Restorasi	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara (KM)	0	0	4.870.000.000,00	1	4.040.000.000,00	0	1.800.000.000,00	0	1.800.000.000,00	1	8.800.000.000,00	
	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	4,8	0		1		1		1		1		
	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	0	0		1		0		0		1		
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	14,7	2		1		1		1		1		
	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		0		1		0		0		1		
	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		
	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun (KM)		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		
	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	8	0		7		7		7		7		
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	4	2		2		2		2		2		
1.03.02.1.01.0009 - Pembangunan Tanggul Sungai				0,00		190.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		1.200.000.000,00	
Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	4,8	0	0,00	1	190.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.02.1.01.0075 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	8	0	0,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00	
1.03.02.1.01.0079 - Normalisasi/Restorasi Sungai				780.000.000,00		700.000.000,00		300.000.000,00		200.000.000,00		1.500.000.000,00	
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	14,7	2	780.000.000,00	1	700.000.000,00	1	300.000.000,00	1	200.000.000,00	1	1.500.000.000,00	
1.03.02.1.01.0097 - Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir				0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		500.000.000,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	
1.03.02.1.01.0098 - Pembangunan Kanal Banjir				2.890.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		2.500.000.000,00	
Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)		0,5	2.890.000.000,00	0,5	500.000.000,00	0,5	500.000.000,00	0,5	500.000.000,00	0,5	2.500.000.000,00	
1.03.02.1.01.0107 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		500.000.000,00	
Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	0	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	
1.03.02.1.01.0122 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				300.000.000,00		500.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		450.000.000,00	
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	4	2	300.000.000,00	2	500.000.000,00	2	200.000.000,00	2	250.000.000,00	2	450.000.000,00	
1.03.02.1.01.0124 - Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai				0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		500.000.000,00	
Terpeliharanya Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara (KM)	0	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	
1.03.02.1.01.0127 - Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai				900.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Terbangunnya Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun (KM)		0,5	900.000.000,00	0,5	500.000.000,00	0,5	500.000.000,00	0,5	500.000.000,00	0,5	1.500.000.000,00	
Tersedianya Kapasitas Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi (Bendungan)	0	0	0,00	0	200.000.000,00	0	200.000.000,00	0	200.000.000,00	0	200.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Embung yang dibangun (Unit)	0	0		0		0		0				
	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)	0	0		0		0		9		0		
1.03.02.1.01.0071 - Rehabilitasi Bendungan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terehabilitasinya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi (Bendungan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.02.1.01.0121 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
1.03.02.1.01.0130 - Pembangunan Embung				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terbangunnya Embung untuk fungsi konservasi dan penyediaan air baku	Jumlah Embung yang dibangun (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.02.1.01.0137 - Operasi dan Pemeliharaan Embung				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Beroperasi dan terpeliharanya embung	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00	0	0,00	
1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0,00		630.000.000,00		0,00		0,00		1.000.000.000,00	
Terbangunnya Jaringan Iriasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0	0	0,00	0,5	630.000.000,00		0,00	0	0,00	0,5	1.000.000.000,00	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	0	0		0,5				0		0,5		
1.03.02.1.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		500.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	0	0	0,00	0,5	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0,5	500.000.000,00	
1.03.02.1.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				0,00		130.000.000,00		0,00		0,00		500.000.000,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0	0	0,00	0,5	130.000.000,00		0,00	0	0,00	0,5	500.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi				0		0		0		0		0	1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		11.000.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	33,51	51,8	1.100.000.000,00	53,25	1.100.000.000,00	54,7	2.000.000.000,00	56,15	2.000.000.000,00	57,6	11.000.000.000,00	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		11.000.000.000,00	
Tersedianya Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	0	0	1.100.000.000,00	0	1.100.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	11.000.000.000,00	
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (Unit)	0	0		0		0		1				
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)	0	0		0		0		1				
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/Detik)	0	0,1		1,4		1,4		1,4				



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (Liter/Detik)	2	0		0		1		1		2		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen)	2	1		2		2		2				
	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kabupaten/Kota)	0	0		2		2		2		1		
	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kabupaten/Kota)	0	0		0		2		2		2		
1.03.03.1.01.0014 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kabupaten/Kota)	0	0	0,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.03.03.1.01.0017 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				100.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Terbanggunya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/Detik)	0	0,1	100.000.000,00	1,4	500.000.000,00	1,4	500.000.000,00	1,4	500.000.000,00	1,4	1.500.000.000,00	
1.03.03.1.01.0018 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				0,00		0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		5.500.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (Liter/Detik)	2	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	2	5.500.000.000,00	
1.03.03.1.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0,00		0,00		0,00		0,00		1.000.000.000,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.03.1.01.0020 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		1.000.000.000,00	
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000.000,00	
1.03.03.1.01.0021 - Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				0,00		0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kabupaten/Kota)	0	0	0,00	0	0,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	
1.03.03.1.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				1.000.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen)	2	1	1.000.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	1.500.000.000,00	
1.03.03.1.01.0026 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0,00		0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	0	0	0,00	0	0,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum				0		0		0		0		0	1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN 1.03.2.10.0.00.03.0002 - UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				0,00		0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		1.500.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan persampahan regional	Persentase Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota (%)	0	0	0,00	0	0,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	50	1.500.000.000,00	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.04.1.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				0,00		0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		1.500.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan yang dibangun dan direhabilitasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan (Kabupaten/Kota)	0	0	0,00	0	0,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	1.500.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	0	0		0		0		1		1		
	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun (Ton/hari)	0	0		0		0		0		1		
	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan (Unit)	0	0		0		2		0		0		
1.03.04.1.01.0012 - Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00	
Terfasilitasinya Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan (Kabupaten/Kota)	0	0	0,00	0	0,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	300.000.000,00	
1.03.04.1.01.0013 - Pembangunan TPA/TPST/SPA				0,00		0,00		0,00		0,00		1.120.000.000,00	
Terbangunnya TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun (Ton/hari)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.120.000.000,00	
1.03.04.1.01.0016 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		80.000.000,00	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	1	80.000.000,00	
1.03.04.1.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA				0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		0,00	
Tersedianya sarana pendukung TPA/TPST/SPA	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	2	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan persampahan regional				0		0		0		0		0	1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
													1.03.2.10.0.00.03.0002 - UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		4.500.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	6,6	8,92	300.000.000,00	10,08	300.000.000,00	11,24	500.000.000,00	12,4	500.000.000,00	13,50	4.500.000.000,00	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.05.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional				300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		4.500.000.000,00	
Terpenuhinya Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (kabupaten/kota)	0	0	300.000.000,00	0	300.000.000,00	0	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	4.500.000.000,00	
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun (M ³ /Hari)	0	0		0		100		0		100		
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	50	0		0		0		50		50		
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Kabupaten/Kota)	7	7		7		7		7		7		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1	0		1		1		1		1		



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.05.1.01.0013 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat				0,00		0,00		400.000.000,00		0,00		4.000.000.000,00	
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun (M ³ /Hari)	0	0	0,00	0	0,00	100	400.000.000,00	0	0,00	100	4.000.000.000,00	
1.03.05.1.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				0,00		200.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1	0	0,00	1	200.000.000,00	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
1.03.05.1.01.0016 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terfasilitasinya Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (kabupaten/kota)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.03.05.1.01.0022 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota				300.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Kabupaten/Kota)	7	7	300.000.000,00	7	100.000.000,00	7	50.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	
1.03.05.1.01.0023 - Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				0,00		0,00		0,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan/atau Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah				300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		4.500.000.000,00	1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
													1.03.2.10.0.00.03.0002 - UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				1.130.000.000,00		1.130.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	0	21,43	1.130.000.000,00	14,29	1.130.000.000,00	21,4	300.000.000,00	21,4	300.000.000,00	21,4	300.000.000,00	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.06.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi				1.130.000.000,00		1.130.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Tersedianya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	0	2	1.130.000.000,00	2	1.130.000.000,00	3	300.000.000,00	0	300.000.000,00	0	300.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	0	0		1		0		1		1		
	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		3		0		0		
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0		1		0		2		2		
1.03.06.1.01.0008 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				1.130.000.000,00		830.000.000,00		200.000.000,00		0,00		0,00	
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	0	2	1.130.000.000,00	2	830.000.000,00	3	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.06.1.01.0010 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				0,00		100.000.000,00		0,00		200.000.000,00		200.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	
1.03.06.1.01.0011 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan				0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		0,00	
Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	3	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.06.1.01.0012 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				0,00		200.000.000,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	0	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan				0		0		0		0		0	1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
													1.03.2.10.0.00.03.0002 - UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				120.950.000.000,00		80.850.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		15.000.000.000,00	
Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	100	37,04	120.950.000.000,00	7,41	80.850.000.000,00	7,41	5.000.000.000,00	7,41	5.000.000.000,00	11	15.000.000.000,00	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				120.950.000.000,00		80.850.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		15.000.000.000,00	
Tersedianya bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Kabupaten/Kota)	0	0	120.950.000.000,00	2	80.850.000.000,00	0	5.000.000.000,00	0	5.000.000.000,00	3	15.000.000.000,00	
	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola (Rumah Negara)	4	0				0				0		1



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dokumen)	1	2		8		1		1		1		
	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	0	8		1		1		2				
	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	3	0		0		1		1				
	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) (Bangunan Gedung Negara)	0	0		1		1		1				
1.03.08.1.01.0013 - Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara				0,00		0,00		0,00		0,00		3.000.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola (Rumah Negara)	4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.000.000.000,00	
1.03.08.1.01.0015 - Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terdaftar nya Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) (Bangunan Gedung Negara)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.03.08.1.01.0016 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				0,00		0,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	3	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	
1.03.08.1.01.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota				0,00		80.000.000,00		0,00		0,00		80.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Kabupaten/Kota)	0	0	0,00	2	80.000.000,00	0	0,00	0	0,00	3	80.000.000,00	
1.03.08.1.01.0019 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk				55.250.000.000,00		79.200.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kepentingan Strategis Daerah Provinsi													
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dokumen)	1	2	55.250.000.000,00	8	79.200.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	
1.03.08.1.01.0020 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				65.700.000.000,00		1.470.000.000,00		2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		9.820.000.000,00	
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	0	8	65.700.000.000,00	1	1.470.000.000,00	1	2.900.000.000,00	1	2.900.000.000,00	2	9.820.000.000,00	
Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi				0		0		0		0		0	1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
													1.03.2.10.0.00.03.0002 - UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				57.650.000.000,00		71.200.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		10.100.000.000,00	
Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	27,27	57.650.000.000,00	9,09	71.200.000.000,00	9,09	5.000.000.000,00	9,09	5.000.000.000,00	18,18	10.100.000.000,00	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.09.1.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				57.500.000.000,00		71.000.000.000,00		4.800.000.000,00		4.800.000.000,00		9.600.000.000,00	
Terpenuhinya Penataan Bangunan dan Lingkungan diKawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	57.500.000.000,00	0	71.000.000.000,00	1	4.800.000.000,00	1	4.800.000.000,00	1	9.600.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah dokumen legal yang disahkan terkait perencanaan tata bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		0		0		1		
	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	4	3		1		1		1		2		
	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (kabupaten/kota)	0	0		0		1		1		1		
1.03.09.1.01.0014 - Pendampingan Legalisasi Perencanaan Teknis dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		50.000.000,00	
Tersusunnya dokumen legal sebagai acuan perencanaan detil dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen legal yang disahkan terkait perencanaan tata bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	
1.03.09.1.01.0017 - Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Tersusunnya Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	
1.03.09.1.01.0018 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.500.000.000,00	
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (kabupaten/kota)	0	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.500.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.03.09.1.01.0019 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				57.500.000.000,00		71.000.000.000,00		2.800.000.000,00		2.800.000.000,00		7.050.000.000,00		
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	4	3	57.500.000.000,00	1	71.000.000.000,00	1	2.800.000.000,00	1	2.800.000.000,00	2	7.050.000.000,00		
Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				0		0		0		0		0	1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN	
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100				100				100			100
1.03.09.1.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		500.000.000,00		
Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		0	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	500.000.000,00		
	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)		1				1				1			
	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (kabupaten/kota)		0				1				1			
1.03.09.1.01.0017 - Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.09.1.01.0018 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (kabupaten/kota)		0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.09.1.01.0019 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		400.000.000,00	
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)		1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	400.000.000,00	
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				118.154.272.000,00		30.450.000.000,00		26.900.000.000,00		21.900.000.000,00		79.265.607.747,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	80,87	82,18	118.154.272.000,00	82,29	30.450.000.000,00	82,40	26.900.000.000,00	82,51	21.900.000.000,00	82,81	79.265.607.747,00	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi				117.654.272.000,00		30.000.000.000,00		26.450.000.000,00		21.450.000.000,00		78.465.607.747,00	
Terpenuhinya Jalan Provinsi Kondisi Mantap	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	0	0	117.654.272.000,00	0,08	30.000.000.000,00	0,04	26.450.000.000,00	0,04	21.450.000.000,00	0,04	78.465.607.747,00	
	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin (KM)	26	4,41		4,60		4,70		5,87		5,87		
	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala (KM)	0	0,3		0,33		0,36		0,45		0,40		
	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)						0,18		0,18		0,18		
	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur (KM)												
	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	0,34	0,15		0,15		0,15		0,19		0,19		
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	620,76	620,76		620,76		620,76		620,76		620,76		



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	5,09	0		4,33		4,76		5,24		5,24		
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	0	20		5		0		0		22		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	5	2		5		5		5		5		
	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	0	0		0		1		1		1		
	Panjang Flyover yang Dibangun (Meter)	0	0		5		10		10		33		
	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	0	0		620,76		620,76		0		620,76		
	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	0	5		5		5		5		5		
	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Meter)	8	0		8		4		4		4		
	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	0	8		8		4		4		4		
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	2,73	2,28		0,5		0,5		0,5		3,72		
1.03.10.1.01.0030 - Rehabilitasi Jalan				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	0	0	0,00	0,08	500.000.000,00	0,04	500.000.000,00	0,04	500.000.000,00	0,04	500.000.000,00	
1.03.10.1.01.0031 - Rekonstruksi Jalan				77.038.640.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		15.000.000.000,00	
Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	2,73	2,28	77.038.640.000,00	0,5	2.000.000.000,00	0,5	2.000.000.000,00	0,5	2.000.000.000,00	3,72	15.000.000.000,00	
1.03.10.1.01.0035 - Pelebaran Jalan Menambah Lajur				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur (KM)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.10.1.01.0041 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				500.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	5	2	500.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00	
1.03.10.1.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	620,76	620,76	1.000.000.000,00	620,76	1.000.000.000,00	620,76	1.000.000.000,00	620,76	1.000.000.000,00	620,76	1.000.000.000,00	
1.03.10.1.01.0044 - Pengelolaan Leger Jalan				0,00		0,00		200.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	
1.03.10.1.01.0045 - Pemeliharaan Rutin Jalan				6.500.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		7.000.000.000,00	
&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin (KM)	26	4,41	6.500.000.000,00	4,60	5.000.000.000,00	4,70	5.000.000.000,00	5,87	5.000.000.000,00	5,87	7.000.000.000,00	
1.03.10.1.01.0047 - Pemeliharaan Berkala Jembatan				3.500.000.000,00		1.000.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		3.665.607.747,00	
&Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	0	8	3.500.000.000,00	8	1.000.000.000,00	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00	4	3.665.607.747,00	
1.03.10.1.01.0051 - Pelebaran Jalan Menuju Standar				0,00		0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)			0,00		0,00	0,18	500.000.000,00	0,18	500.000.000,00	0,18	500.000.000,00	
1.03.10.1.01.0052 - Rehabilitasi Jembatan				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
&Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	0	5	1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	3.000.000.000,00	
1.03.10.1.01.0053 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi				0,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	5,09	0	0,00	4,33	1.000.000.000,00	4,76	1.000.000.000,00	5,24	1.000.000.000,00	5,24	3.000.000.000,00	
1.03.10.1.01.0054 - Pembangunan Jembatan				14.000.000.000,00		5.000.000.000,00		0,00		0,00		15.000.000.000,00	
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	0	20	14.000.000.000,00	5	5.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	22	15.000.000.000,00	
1.03.10.1.01.0055 - Pembangunan Flyover				0,00		7.500.000.000,00		9.450.000.000,00		4.950.000.000,00		18.000.000.000,00	
Terlaksananya Pembangunan Flyover	Panjang Flyover yang Dibangun (Meter)	0	0	0,00	5	7.500.000.000,00	10	9.450.000.000,00	10	4.950.000.000,00	33	18.000.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.10.1.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				2.315.632.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
&Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala (KM)	0	0,3	2.315.632.000,00	0,33	1.000.000.000,00	0,36	1.000.000.000,00	0,45	1.000.000.000,00	0,40	1.000.000.000,00	
1.03.10.1.01.0057 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				0,00		1.000.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Meter)	8	0	0,00	8	1.000.000.000,00	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00	
1.03.10.1.01.0058 - Pembangunan Jalan				11.800.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		8.000.000.000,00	
&Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	0,34	0,15	11.800.000.000,00	0,15	2.000.000.000,00	0,15	2.000.000.000,00	0,19	2.000.000.000,00	0,19	8.000.000.000,00	
1.03.10.1.01.0059 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi				0,00		1.000.000.000,00		800.000.000,00		0,00		800.000.000,00	
Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	0	0	0,00	620,76	1.000.000.000,00	620,76	800.000.000,00	0	0,00	620,76	800.000.000,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman				0		0		0		0		0	1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	0	7,4				6,16				6,15		
1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi				500.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		800.000.000,00	
Persentase Jalan Kondisi Mantap	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)		0	500.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	800.000.000,00	
	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Meter)	1	0				1				1		
	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin (KM)	1	3				3				3		
1.03.10.1.01.0045 - Pemeliharaan Rutin Jalan				500.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin (KM)	1	3	500.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	
1.03.10.1.01.0057 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		350.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Meter)	1	0	0,00		0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	350.000.000,00	
1.03.10.1.01.0058 - Pembangunan Jalan				0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		100.000.000,00	
&Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)		0	0,00	1	100.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	100.000.000,00	
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				700.000.000,00		700.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		700.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%)	6,4	8	700.000.000,00	8	700.000.000,00	8	500.000.000,00	8	500.000.000,00	8	700.000.000,00	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.11.1.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi				450.000.000,00		435.000.000,00		235.000.000,00		320.000.000,00		520.000.000,00	
Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi yang berkualifikasi Ahli	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1	1	450.000.000,00	1	435.000.000,00	1	235.000.000,00	1	320.000.000,00	1	520.000.000,00	
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih (Orang)	72	90		50		50		50		90		
	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen)	0	0		1						0		
	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen)		0						1		1		
	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Orang)		15		5		5		2		5		
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya (Lembaga)		0		1		1		1		1		
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	72	90		90		90		90		90		
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Orang)		0		50		0		50		50		



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.11.1.01.0009 - Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		15.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Orang)		15	100.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	2	15.000.000,00	5	50.000.000,00	
1.03.11.1.01.0010 - Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				0,00		0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Training Need Assesment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen)		0	0,00		0,00		0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.11.1.01.0011 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				150.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00	
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih (Orang)	72	90	150.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	90	100.000.000,00	
1.03.11.1.01.0012 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.11.1.01.0013 - Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00		0,00		0,00	0	0,00	
1.03.11.1.01.0014 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				100.000.000,00		135.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		150.000.000,00	
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	72	90	100.000.000,00	90	135.000.000,00	90	70.000.000,00	90	70.000.000,00	90	150.000.000,00	
1.03.11.1.01.0015 - Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				0,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		70.000.000,00	
Terantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Orang)		0	0,00	50	50.000.000,00	0	0,00	50	50.000.000,00	50	70.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.11.1.01.0016 - Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi				0,00		50.000.000,00		15.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00	
Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya (Lembaga)		0	0,00	1	50.000.000,00	1	15.000.000,00	1	35.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.11.1.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi				140.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00	
Tersedianya Layanan Konstruksi	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	18	0	140.000.000,00	5	110.000.000,00	5	110.000.000,00	5	110.000.000,00	5	110.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	1	0		1		1		1				
1.03.11.1.02.0006 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				80.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1	1	80.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
1.03.11.1.02.0007 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	1	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
1.03.11.1.02.0008 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				60.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan (Dokumen)	1	1	60.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	
1.03.11.1.02.0009 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	18	0	0,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.11.1.03 - Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				110.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Terpenuninya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	8	1	110.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)		0		1		1		0		0		
	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)		0		1		1		1		1		
	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)		0		20		20						
1.03.11.1.03.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				60.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	8	1	60.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
1.03.11.1.03.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)		0	0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.11.1.03.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		0,00		0,00	
Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)		0	0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.11.1.03.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				0,00		45.000.000,00		45.000.000,00		0,00		0,00	
Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)		0	0,00	20	45.000.000,00	20	45.000.000,00		0,00		0,00	
1.03.11.1.03.0008 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi				50.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional				0		0		0		0		0	1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				700.000.000,00		700.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		700.000.000,00	
Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	66,63	70	700.000.000,00	72	700.000.000,00	75	500.000.000,00	80	500.000.000,00	80	700.000.000,00	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.12.1.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi				180.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	0	1	180.000.000,00	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi (Dokumen)		1										
	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)	0	0		200		0		80		80		
	Jumlah Perda RTRW Provinsi (Dokumen)	0	1		0		0		0				
	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		
1.03.12.1.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				40.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi (Dokumen)		1	40.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.12.1.01.0005 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersampainya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	0	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.12.1.01.0006 - Penetapan RTRW Provinsi				100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Perda RTRW Provinsi	Jumlah Perda RTRW Provinsi (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.12.1.01.0007 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.12.1.01.0009 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang				0,00		100.000.000,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersampainya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)	0	0	0,00	200	100.000.000,00	0	0,00	80	50.000.000,00	80	50.000.000,00	
1.03.12.1.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya koordinasi dan siknronisasi perencanaan tata ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi (Dokumen)	0	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari (Dokumen)	2	0		1		0		1		1		
	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
1.03.12.1.02.0006 - Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dengan adanya laporan progres dan tindak lanjut dari provinsi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.12.1.02.0009 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari (Dokumen)	2	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.12.1.02.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi				0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.12.1.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya koordinasi dan siknronisasi pemanfaatan tata ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Laporan)	0	1	100.000.000,00	0	100.000.000,00	1	150.000.000,00	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	
	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Dokumen)	0	0		0		0						
	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1	1		1		1		1				
1.03.12.1.03.0004 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		0,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Laporan)	0	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.12.1.03.0006 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				0,00		0,00		50.000.000,00		0,00		0,00	
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.12.1.03.0007 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				50.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.12.1.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				320.000.000,00		300.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		350.000.000,00	
Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	0	0	320.000.000,00	1	300.000.000,00	0	150.000.000,00	0	150.000.000,00	1	350.000.000,00	
	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan (Dokumen)		0		0		1		0		1		
	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat (Dokumen)	1	1		1		0		1		1		
	Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	0	0		1		0		0		1		
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	0	1		0		0		0		1		
	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	0	0		1		0		0		1		



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.12.1.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	
1.03.12.1.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.12.1.04.0005 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang				120.000.000,00		0,00		0,00		0,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	0	1	120.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	
1.03.12.1.04.0006 - Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat				50.000.000,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.12.1.04.0007 - Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan				0,00		0,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00	
Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan (Dokumen)		0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	
1.03.12.1.04.0011 - Penilaian Perwujudan RTR				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.03.12.1.04.0014 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMKĀ				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		25.000.000,00	
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan RuangĀ	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	25.000.000,00	
1.03.12.1.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		50.000.000,00	



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	
Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang				0		0		0		0		0	1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00	
2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase luas lahan yang di bebaskan untuk kepentingan umum (%)	0	45	1.100.000.000,00	20,53	1.100.000.000,00	20,53	1.000.000.000,00	6,88	1.000.000.000,00	6,88	1.000.000.000,00	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.03.1.01 - Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi				1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Terfasilitasinya OPD/Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya yang mengajukan permohonan penetapan lokasi	Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Dokumen)	0	0	1.100.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Laporan)	0	0		1		1		1		1		1



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.10.03.1.01.0002 - Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.10.03.1.01.0003 - Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				1.100.000.000,00		900.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00	
Terlaksananya koordinasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah (Dokumen)	0	1	1.100.000.000,00	1	900.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	
2.10.03.1.01.0004 - Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.10.03.1.01.0005 - Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.10.03.1.01.0006 - Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Laporan)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum				0		0		0		0		0	1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN



RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													1.03.2.10.0.00.03.0002 - UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terwujudnya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Fasilitasi Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan riau (%)	0	0	0,00	25	0,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.06.1.01 - Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria. (Berita Acara)	0	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.10.06.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi.	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria. (Berita Acara)	0	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	



4.2 Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas

Program prioritas RPJMD dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan				
1.	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1.03.02.1.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.02.1.01.0009 - Pembangunan Tanggul Sungai	
			1.03.02.1.01.0071 - Rehabilitasi Bendungan	
			1.03.02.1.01.0075 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	
			1.03.02.1.01.0079 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
			1.03.02.1.01.0097 - Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	
			1.03.02.1.01.0098 - Pembangunan Kanal Banjir	
			1.03.02.1.01.0107 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
			1.03.02.1.01.0121 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
			1.03.02.1.01.0122 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
			1.03.02.1.01.0124 - Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	
			1.03.02.1.01.0127 - Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	
			1.03.02.1.01.0130 - Pembangunan Embung	
			1.03.02.1.01.0137 - Operasi dan Pemeliharaan Embung	
			1.03.02.1.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.03.02.1.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
			1.03.02.1.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
2.	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
			1.03.03.1.01.0014 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	
			1.03.03.1.01.0017 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
			1.03.03.1.01.0018 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
			1.03.03.1.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			1.03.03.1.01.0020 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
			1.03.03.1.01.0021 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
			1.03.03.1.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
			1.03.03.1.01.0026 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
3.	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	1.03.05.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	
			1.03.05.1.01.0013 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
			1.03.05.1.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			1.03.05.1.01.0016 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	
			1.03.05.1.01.0022 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	
			1.03.05.1.01.0023 - Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
			1.03.08.1.01.0013 - Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	
			1.03.08.1.01.0015 - Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	
			1.03.08.1.01.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	
			1.03.08.1.01.0019 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
			1.03.08.1.01.0020 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
5.	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
			1.03.10.1.01.0030 - Rehabilitasi Jalan	
			1.03.10.1.01.0031 - Rekonstruksi Jalan	
			1.03.10.1.01.0041 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			1.03.10.1.01.0044 - Pengelolaan Leger Jalan	
			1.03.10.1.01.0045 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
			1.03.10.1.01.0047 - Pemeliharaan Berkala Jembatan	
			1.03.10.1.01.0051 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	
			1.03.10.1.01.0052 - Rehabilitasi Jembatan	
			1.03.10.1.01.0053 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	
			1.03.10.1.01.0054 - Pembangunan Jembatan	
			1.03.10.1.01.0055 - Pembangunan Flyover	
			1.03.10.1.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
			1.03.10.1.01.0057 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			1.03.10.1.01.0058 - Pembangunan Jalan	
			1.03.10.1.01.0059 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	



4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan									
1.	Rasio Capaian Infrastruktur ke-Puan	%	0	38,19	42,64	40	42,86	43,76	45,90	
2.	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	0	0	45	20,53	20,53	6,88	6,88	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Perincian Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(12)
	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi	%	0,098	0,103	0,113	0,128	0,153	0,178	0,203	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(12)
	oleh infrastruktur pengendalian banjir									
2.	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	6,4	8	8	8	8	8	8	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
4.	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	0	0	21,43	14,29	21,4	21,4	21,4	
5.	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	80,87	81,10	82,18	82,29	82,40	82,51	82,81	
6.	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	66,63	70	70	72	75	80	80	
7.	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	100	27,27	27,27	9,09	9,09	9,09	18,18	
8.	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	%	100	29,63	37,04	7,41	7,41	7,41	11	
9.	Persentase Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	25	25	50	
10.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,78	88,80	88,80	88,83	88,85	88,87	88,90	
11.	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	84,53	84,53	85,38	86,23	87,09	87,96	88,64	
12.	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	10,26	10,26	24,49	27,55	30,52	33,40	36,21	
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,78	88,80	88,80	88,83	88,85	88,87	88,90	
14.	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
15.	Persentase Fasilitasi Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan Riau	%	0	0	0	25	25	25	25	
16.	Persentase luas lahan yang di bebaskan untuk kepentingan umum	%	0	0	45	20,53	20,53	6,88	6,88	



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman arah kebijakan dan kinerja perangkat daerah yang berlaku selama periode Tahun 2025-2029. Selain itu, Rencana Strategis ini mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi landasan strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam mengimplementasikan program serta kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

- a. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
- b. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
- c. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 2026 hingga tahun 2030. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan,



- program dan kegiatan, maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
 - e. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pedoman Pengendalian dan Evaluasi

Pedoman pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 maka perlu dilakukan pengelolaan dan pengendalian risiko strategis perangkat daerah.